

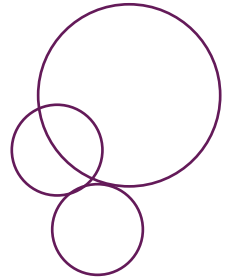
Katalog : 5101023.33



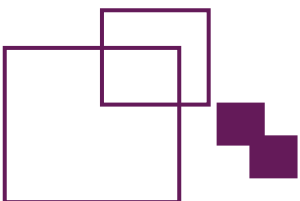
2012
-
2022

Analisis
**KETIMPANGAN
PERTANIAN**
WILAYAH PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

ANALISIS KETIMPANGAN PERTANIAN WILAYAH PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 2012-2022



<https://jateng.bps.go.id>



ANALISIS KETIMPANGAN PERTANIAN WILAYAH PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 2012-2022

No. ISBN : -
No. Publikasi : 33000.2393
Katalog : 5101023.33

Ukuran Buku : B5-JIS
Jumlah Halaman : xii + 83 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh:

@Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh:

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN:

Pengarah : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

Penyunting : Didik Nursetyohadi, M.Agb.
Dra. Eny Pramudyastuti

Naskah : Irma Nur Afifah, SST, M.Si

Penyusun : Irma Nur Afifah, SST, M.Si

**Desain Cover dan
Tata Letak** : Joko Mulyono

<https://jateng.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Jawa Tengah merupakan salah satu diantara provinsi dengan sebutan lumbung padi nasional, sehingga tak heran bila pertanian merupakan sektor yang berperan strategis dan penting dalam pembangunan perekonomian di Jawa Tengah. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan pertanian belum merata di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Penyusunan publikasi Analisis Ketimpangan Pertanian Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2012-2022 bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi kesenjangan pertanian di Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Publikasi ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan dan memberikan informasi berharga bagi para pengguna data BPS baik dari kalangan pemerintah maupun publik.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Semarang, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Dadang Hardiwan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xv
Ringkasan Eksekutif	1
Bab I	Pembangunan Pertanian Provinsi Jawa Tengah
1.1.	Latar Belakang..... 5
1.2.	Pembangunan Pertanian Berlangsung di Tengah Berbagai Tantangan..... 6
1.3.	Mengenal Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah..... 7
1.3.1.	WP Barlingmascakeb..... 8
1.3.2.	WP Purwomanggung..... 9
1.3.3.	WP Subosukawonosraten..... 9
1.3.4.	WP Banglor..... 10
1.3.5.	WP Wanakurti..... 10
1.3.6.	WP Kedungsepur..... 11
1.3.7.	WP Petanglong..... 12
1.3.8.	WP Bregasmalang..... 12
Bab II	Metode Pengukuran Ketimpangandan Aplikasinya dalam Pertanian
2.1.	Kurva lorenz dan Koefisien Gini..... 16
2.2.	<i>Location Quotient</i> 17
2.3.	Tipologi Klassen. 20
2.4.	Indeks Williamson..... 21
Bab III	Potensi Pertanian Jawa Tengah
3.1.	Kondisi Umum Jawa Tengah..... 25
3.2.	Potensi Pertanian berdasarkan Subsektor dan Wilayah Pembangunan..... 28
3.2.1.	Tanaman Pangan..... 28

3.2.2. Hortikultura.....	29
3.2.3. Perkebunan.....	30
3.2.4. Peternakan.....	31
3.2.5. Kehutanan.....	32
3.2.6. Perikanan.....	33
Bab IV Ketimpangan Pertanian Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah	
4.1. Klasifikasi Pembangunan Pertanian.....	37
4.2. Identifikasi Subsektor Andalan.....	41
4.2.1. Wilayah Basis Tanaman Pangan.....	44
4.2.2. Wilayah Basis Hortikultura.....	46
4.2.3. Wilayah Basis Perkebunan.....	48
4.2.4. Wilayah Basis Peternakan.....	49
4.2.5. Wilayah Basis Jasa Pertanian.....	51
4.2.6. Wilayah Basis Kehutanan.....	53
4.2.7. Wilayah Basis Perikanan.....	54
4.3. Ketimpangan Pendapatan Pertanian	56
4.3.1. Ketimpangan Pendapatan Makro.....	57
4.3.2. Ketimpangan Pendapatan Mikro.....	58
4.4. Ketimpangan Penguasaan Lahan Pertanian	64
4.4.1. Luas Wilayah dan Lahan Pertanian.....	65
4.4.2. Penguasaan Lahan oleh Rumah Tangga Usaha Pertanian...	67
4.4.3. Petani Gurem vs Non-Gurem.....	70
4.4.4. Ketimpangan dari Indeks Williamson.....	73
Bab V Kesimpulan	77
Lampiran	79
Daftar Pustaka	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Klasifikasi Koefisien Gini.....	17
Tabel 2.2.	Matrik Tipologi Klassen.....	20
Tabel 2.3.	Matriks Strategi Pengembangan Sektor Perekonomian.....	21
Tabel 3.1.	Luas Lahan menurut Penggunaannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.....	27
Tabel 3.2.	Rata-rata PDRB Tanaman Pangan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012 dan 2022.....	29
Tabel 3.3.	Rata-rata PDRB Hortikultura dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022.....	30
Tabel 3.4.	Rata-rata PDRB Perkebunan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022.....	31
Tabel 3.5.	Rata-rata PDRB Peternakan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022.....	31
Tabel 3.6.	Rata-rata PDRB Kehutanan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022.....	32
Tabel 3.7.	Rata-rata PDRB Perikanan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022.....	33
Tabel 4.1.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Lapangan Usaha Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, 2012-2022.....	42
Tabel 4.2.	Luas Wilayah, Luas Lahan Pertanian, dan Persentase Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Wilayah Kabupaten/Kota.....	66
Tabel 4.3.	Proporsi Petani Gurem terhadap Total RTUP per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	72
Tabel 4.4.	Indeks Williamson Ketimpangan Penguasaan Lahan.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Jawa Tengah, 2012-2022 (persen).....	6
Gambar 2.1.	Kurva Lorenz.....	16
Gambar 4.1.	Hasil Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasarkan PDRB Pertanian, 2012-2022.....	39
Gambar 4.2.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Lapangan Usaha Pertanian Kabupaten Kota di Jawa Tengah, 2012-2022.....	40
Gambar 4.3.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Lapangan Usaha Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012-2022.....	44
Gambar 4.4.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Subkategori Tanaman Pangan Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022.....	45
Gambar 4.5.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Subkategori Hortikultura Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022.....	47
Gambar 4.6.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Subkategori Perkebunan Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022.....	49
Gambar 4.7.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Subkategori Peternakan Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022.....	50
Gambar 4.8.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Subkategori Jasa Pertanian Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022.....	52
Gambar 4.9.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Subkategori Kehutanan Kabupaten Kota di Jawa Tengah, 2012 dan 2022.....	54
Gambar 4.10.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Subkategori Perikanan Kabupaten Kota di Jawa Tengah, 2012 dan 2022.....	55
Gambar 4.11.	Indeks Williamson PDRB Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2012-2022.....	57
Gambar 4.12.	Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian.....	58
Gambar 4.13.	Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Barlingmascakeb.....	59
Gambar 4.14.	Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Purwomanggung.....	60

Gambar 4.15.	Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Subosukawonosraten	60
Gambar 4.16.	Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Banglor.....	61
Gambar 4.17.	Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Wanarakuti.....	62
Gambar 4.18.	Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Kedungsepur.....	62
Gambar 4.19.	Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Petanglong.....	63
Gambar 4.20.	Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Bergasmalang.....	63
Gambar 4.21.	Rata-rata Luas Lahan Sawah dan Non-Sawah yang Dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian di Jawa Tengah (m ²).....	68
Gambar 4.22.	Rata-rata Luas Lahan yang Dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (m ²).....	69
Gambar 4.23.	Jumlah RTUP Gurem dan Non-Gurem di Jawa Tengah.....	70
Gambar 4.24.	Proporsi RTUP dan Luas Lahan yang Dikuasai (persen), 2018.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Nilai <i>Location Quotient</i> Tiap Subsektor Pertanian Berdasarkan Wilayah, 2012.....	79
Lampiran 2.	Nilai <i>Location Quotient</i> Tiap Subsektor Pertanian Berdasarkan Wilayah, 2022.....	80

<https://jateng.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

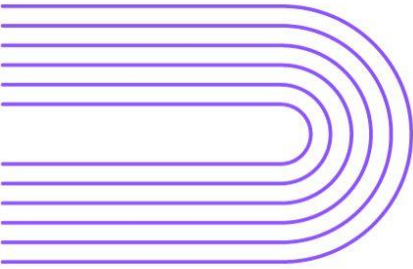
Pembangunan perekonomian merupakan proses jangka panjang dan berkesinambungan. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Demikian halnya dengan pembangunan pertanian, bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Pembangunan pertanian mengupayakan untuk mengembangkan potensi yang ada, yaitu memanfaatkan sumber daya alam optimal. Pertanian menjadi salah satu sektor yang mendominasi struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha.

Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pertanian. Kontribusi lapangan usaha pertanian sebesar 13,53 persen, terbesar ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 29,64 persen dari total angkatan kerja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, dibentuk delapan (8) wilayah pengembangan utama di Jawa Tengah. Pembentukan wilayah pengembangan utama merupakan upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter wilayah serta memperlihatkan keberagaman potensi wilayah.

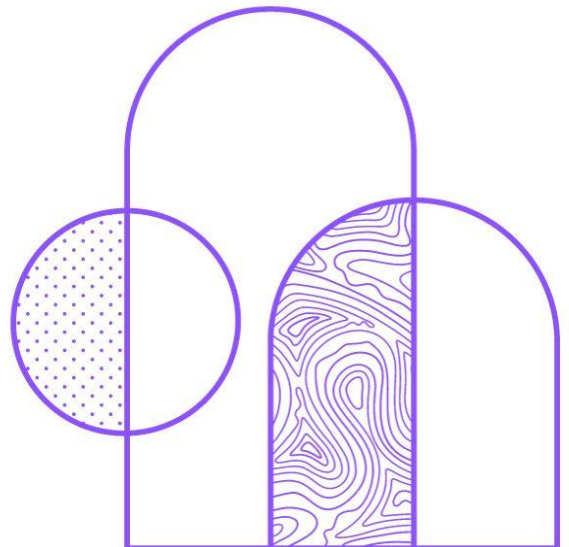
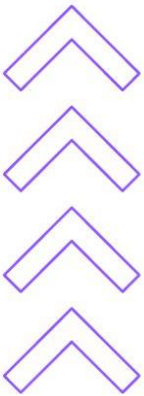
Pengelompokkan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Wilayah pembangunan (WP) yang dimaksud meliputi Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang.



BAB I

Pertanian berperan penting dalam pembangunan perekonomian, terutama bagi Indonesia yang merupakan negara agraris dengan kekayaan alam yang berlimpah, tanah yang subur, dan air yang mencukupi.

<https://jateng.bps.go.id>



BAB I

PEMBANGUNAN PERTANIAN SECARA UMUM

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan perekonomian merupakan proses jangka panjang berkesinambungan yang dilakukan oleh setiap negara. Ukuran suatu pembangunan biasanya diwakili oleh besaran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian adalah pertanian, terutama bagi negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tanah yang subur, dan air yang memadai. Bagi Indonesia yang merupakan negara agraris, pembangunan pertanian tentunya memegang peranan yang penting. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja di sektor pertanian atau dari produk nasional yang bersumber dari pertanian.

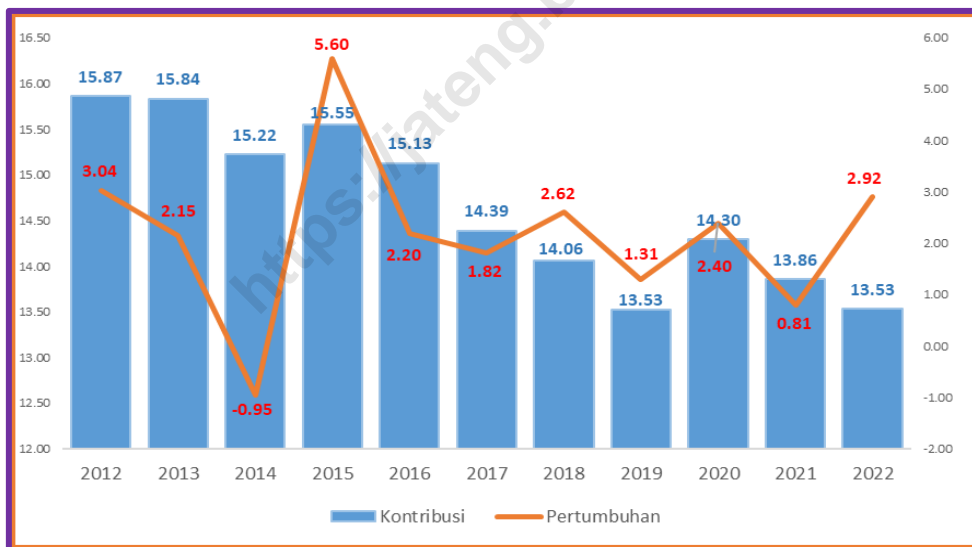
Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan pertanian mengupayakan untuk mengembangkan potensi yang ada, yaitu memanfaatkan sumber daya alam optimal. Pertanian menjadi salah satu sektor yang mendominasi struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha. Kontribusi sektor pertanian sebesar 13,53 persen atau kedua tertinggi setelah sektor industri sebesar 19,62 persen pada tahun 2022. Sementara itu, serapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai 29,64 persen dari seluruh angkatan kerja.

Keberhasilan pembangunan pertanian juga tercermin dari kesejahteraan petani melalui indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dan menurunnya jumlah penduduk miskin di pedesaan. Pada tahun 2020 nilai NTUP (pertanian tanpa perikanan) sebesar 101,37 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 99,44 dan 2022 meningkat menjadi 104,14.

1.2. PEMBANGUNAN PERTANIAN BERLANGSUNG DI TENGAH BERBAGAI TANTANGAN

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang sangat potensial dan merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Pulau Jawa. Selama tahun 2022, nilai tambah dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah mencapai Rp. 211.44 triliun. Kontribusi lapangan usaha pertanian sebesar 13,53 persen, terbesar ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi pertanian berfluktuasi selama sebelas tahun terakhir, rata-rata diatas 13 persen selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

Gambar 1.1. Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Jawa Tengah, 2012-2022 (persen)



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha, 2012-2022

1.3. MENGENAL WILAYAH PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, dibentuk delapan (8) wilayah pengembangan utama di Jawa Tengah. Pembentukan wilayah pengembangan utama adalah dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman wilayah.

Pengelompokkan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Adapun wilayah pembangunan (WP) meliputi: **Barlingmascakeb**, **Purwomanggung**, **Subosukawonosraten**, **Banglor**, **Wanarakuti**, **Kedungsepur**, **Petanglong** dan **Bregasmalang**, sebagaimana pada gambar berikut:



Performa pertanian ditunjukkan oleh pertumbuhan lapangan usaha tersebut. Fluktuasi pertumbuhan memang lebih dinamis bahkan sempat menyentuh angka negatif di tahun 2014. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan pertumbuhan mencapai 5,60 persen. Meskipun angka kontribusi dan pertumbuhan pertanian mengalami pasang surut, namun nilai tambah sektor pertanian konsisten menunjukkan tren peningkatan diatas 13 persen.

Pertumbuhan lapangan usaha pertanian terendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar -0,95 dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2015 sebesar 5,60 persen.

Sektor pertanian merupakan sektor primer yang sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Potensi perbedaan sumber daya alam antar wilayah menjadi salah satu pemicu ketimpangan dalam proses pembangunan. Selain itu, sebagai sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kemampuan setiap wilayah untuk resisten terhadap perubahan dapat berbeda satu sama lain dan semakin memperlebar jurang ketimpangan antardaerah.

Tantangan dalam pembangunan pertanian juga disumbang oleh menuanya tenaga kerja pertanian. Permasalahan utama yaitu perubahan struktur demografi yang kurang menguntungkan bagi sektor pertanian, yaitu petani berusia tua (lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin berkurang. Fenomena *aging farmer* diperparah dengan semakin rendahnya rata-rata tingkat pendidikan dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor lain.

1.3.1. WP BARLINGMASCAKEB

WP Barlingmascakeb meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Arah kebijakan WP Barlingmascakeb adalah "*Pengembangan Wilayah yang Berbasis Agrominapolitan dan Pariwisata Terpadu yang Didukung Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Jasa dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*". Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan. Pada WP ini direncanakan pengembangan kegiatan perekonomian di antaranya adalah: fasilitasi pengembangan kawasan industri Cilacap dan Kebumen; Upgrading RDMP; industri semen; pariwisata koridor Nusakambangan Baturraden dan sekitarnya; serta pengembangan kawasan agropolitan Mangga Mas.

1.3.2. WP PURWOMANGGUNG

WP Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. WP ini juga menjadi sangat strategis karena adanya KSPN Borobudur. Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan kewilayahan baik dari sisi sosial, ekonomi dan kewilayahan maka Perkotaan Purworejo akan didorong statusnya yang semula Pusat Kegiatan Lokal menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sektor unggulan yang dapat dikembangkan pada WP ini adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan yang didukung sektor perkebunan dan peternakan.

Arah kebijakan WP Purwomanggung adalah “Pengembangan Wilayah Purwomanggung Berbasis Pertanian dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan pengembangan ekonomi yang meliputi pengembangan agropolitan dan pariwisata khususnya KSPN Borobudur.

1.3.3. WP SUBOSUKAWONOSRATEN

WP Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi metropolitan Solo Raya terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari Boyolali dan Klaten, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Ampel, Sukoharjo, Kartosuro, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Gemolong, Jaten, Delanggu, dan Tawangmangu. Sektor unggulan wilayah adalah pariwisata, industri dan pertanian.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan pada WP ini adalah pertanian, industri, pariwisata, pertambangan, perikanan yang didukung sektor perkebunan dan peternakan.

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan arah pengembangan wilayah Subosukawonosraten adalah “Pembangunan Wilayah Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan

Industri Pengolahan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”.

Pembangunan Pengembangan pariwisata menjadi arah pembangunan utama kawasan pariwisata terpadu Surakarta dan sekitarnya (Keraton Solo, Sangiran, Tawangmangu Candi Cetho – Suku, dan lain-lain).

1.3.4. WP BANGLOR

WP Banglor meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora, difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, sedangkan perkotaan Rembang diusulkan menjadi PKW. PKL wilayah Banglor meliputi Kawasan Perkotaan Lasem dan Blora.

Rancangan RPJMD Tahun 2018-2023 | VII – 20 Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan.

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah “Pembangunan Wilayah Banglor Berbasis Perindustrian dan Agroforestri yang Didukung Pariwisata Terpadu dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”.

Pembangunan pengembangan wilayah diupayakan untuk meningkatkan pemerataan wilayah timur Jawa Tengah, maka ke depan di wilayah ini akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan membangun kawasan industri baru di Rembang dan Pengembangan Bandara Ngloram, yang diharapkan akan memberikan daya ungkit dan memacu percepatan pembangunan di wilayah ini.

1.3.5. WP WANARAKUTI

WP Wanarakuti (Juwana - Jepara - Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, ifokuskan pada pemantapan fungsi - fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Kalinyamatan dan Bangsri. Memperhatikan potensi dan

keunggulan wilayah Wanarakuti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan pengembangan wilayah Wanarakuti diarahkan pada “Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata yang Didukung Sektor Agrominapolitan dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”.

Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur yaitu Fasilitasi Pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa; Peningkatan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan; Fasilitasi Revitalisasi atau Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang; Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Jepara; Peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa; Inisiasi pembangunan jalan Demak-Jepara (*Coastal Road*).

1.3.6. WP KEDUNGSEPUR

WP Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Tengah maka, wilayah Kedungsapur diarahkan pada upaya: Perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; Pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; Perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura serta; Perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi 12 kawasan perkotaan Purwodadi, Gubug, Godong, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, dan Sukorejo yang diharapkan menunjang kegiatan sosial ekonomi di sekitarnya.

1.3.7. WP PETANGLONG

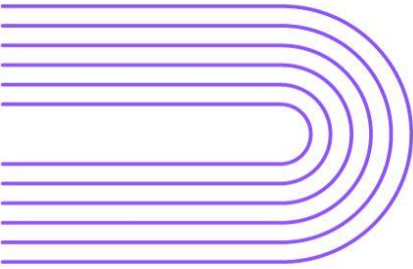
WP Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan, diarahkan sebagai PKW meliputi Kota Pekalongan, dan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Limpung, Batang, Kajen, Kedungwuni, dan Wiradesa. Simpul utama pada kawasan Petanglong adalah kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan dan PKL.

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong adalah “Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dengan dan Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan yang Berkelanjutan”.

1.3.8. WP BREGASMALANG

WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, diarahkan sebagai PKW dan PKL yang berperan penting di wilayah perbatasan barat-utara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. PKW meliputi Kota Tegal, dan PKL meliputi Comal, Pemalang, Slawi - Adiwerna, Ketanggungan - Kersana, Bumiayu, Brebes, dan Losari. Selanjutnya Kota Tegal diusulkan sebagai PKN Promosi. Fokus pengembangan wilayah ini adalah pada pengembangan simpul-simpul pusat pertumbuhan koridor perkotaan Brebes - Tegal - Adiwerna - Slawi, perkotaan Pemalang dan sekitarnya, perkotaan Comal, perkotaan Ketanggungan - Kersana, serta perkotaan Bumiayu dan sekitarnya.

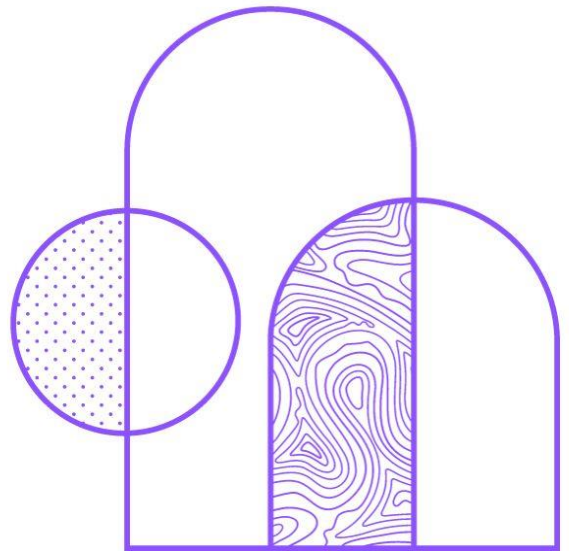
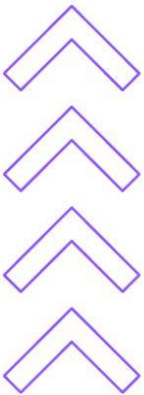
Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Bregasmalang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Bregasmalang adalah “Pengembangan Wilayah Bregasmalang berbasis Agrominapolitan dan Industri Pengolahan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. dan Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan yang Berkelanjutan”.



BAB II

Secara visual, ukuran ketimpangan pendapatan pertanian akan digambarkan dengan Kurva Lorenz. Secara matematis, indeks yang menggambarkan ketimpangan adalah Indeks Williamson, Indeks Gini/Gini Ratio, Indeks Atkinson, Indeks Hoover, Indeks Theil dan General Entropy (GE)

<https://jateng.bps.go.id>



<https://jateng.bps.go.id>

BAB II

METODE PENGUKURAN KETIMPANGAN DAN APLIKASINYA DALAM PERTANIAN

Berbagai kebijakan yang diaplikasikan di suatu wilayah selayaknya memiliki tujuan utama pemerataan pendapatan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, tak terkecuali pada lapangan usaha pertanian. Dalam rangka mengukur tingkat ketimpangan, dibutuhkan gambaran yang bagus mengenai distribusi pendapatan itu sendiri.

Terdapat berbagai metode yang dapat dipergunakan untuk mengukur ketimpangan, baik melalui pendekatan grafis maupun matematis mulai dari yang sederhana hingga yang *advance*. Ukuran-ukuran ketimpangan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai konsentrasi pendapatan, perbandingan antara berbagai distribusi pendapatan, bahkan menjelaskan perbedaan respon dari kebijakan yang berbeda.

Namun perlu diketahui, bahwa tidak ada satu ukuran ketimpangan yang dapat memberikan gambaran utuh mengenai ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan lebih dari satu indikator untuk dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan di lapangan usaha pertanian.

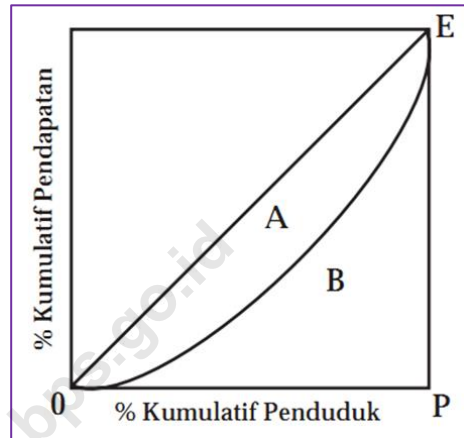
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai berbagai ukuran ketimpangan menggunakan variabel-variabel pertanian. Secara visual, ukuran ketimpangan pendapatan pertanian akan digambarkan dengan Kurva Lorenz. Secara matematis, indeks yang menggambarkan ketimpangan adalah *Indeks Williamson*, *Indeks Gini/Gini Ratio*, *Indeks Atkinson*, *Indeks Hoover*, *Indeks Theil* dan *General Entropy (GE)*. Selain indeks, ukuran rasio yang dapat menggambarkan ketimpangan adalah Rasio Dispersi Desil, Rasio Palma, dan Rasio 20/20. Tidak semua ukuran ini akan digunakan.

Selain ukuran ketimpangan, gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan pertanian antardaerah juga menarik untuk dilihat. Hal ini akan disajikan dalam *Tipologi Klassen* dan *Location Quotient (LQ)*.

2.1. KURVA LORENZ DAN KOEFISIEN GINI

KURVA LORENZ

Kurva Lorenz, dikembangkan oleh ekonom Amerika Max Lorenz pada 1905, merupakan representasi grafis yang menunjukkan ketimpangan pendapatan atau ketimpangan kekayaan. Sumbu X (horizontal) Kurva Lorenz menggambarkan persentil populasi berdasarkan pendapatan atau kekayaan, sedangkan sumbu Y (vertikal) menggambarkan kumulatif dari pendapatan atau kekayaan. Pada suatu titik dengan nilai $X=45$ dan nilai $Y=14,2$ memiliki makna bahwa 45 persen dari populasi mengontrol 14,2 persen dari pendapatan atau kekayaan.



Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Dalam praktiknya, Kurva Lorenz merupakan estimasi matematis dari satu set tidak komplis dari data pendapatan dan kekayaan. Secara visual, Kurva Lorenz selalu dilengkapi dengan garis diagonal dengan slope=1, yang merepresentasikan pemerataan distribusi pendapatan. Kurva Lorenz terletak di bawah garis diagonal. Area di antara garis diagonal lurus dan Kurva Lorenz merupakan koefisien Gini, yang merupakan ukuran skalar dari ketimpangan. Semakin jauh jarak Kurva Lorenz dari garis diagonal lurus, maka semakin besar ketimpangannya.

Dalam analisis ketimpangan pembangunan pertanian, data yang akan digunakan untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan pertanian adalah data pendapatan rumah tangga pertanian dari Sensus Pertanian.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KURVA LORENZ

Kurva Lorenz memberikan penggambaran yang lebih detail dibandingkan dengan koefisien Gini karena visualisasi Kurva Lorenz mampu menunjukkan pada persentil pendapatan berapa terjadi ketimpangan yang sangat mendalam dan seberapa besar ketimpangannya.

Namun perlu diingat bahwa Kurva Lorenz memasukkan set data tidak komplit ke dalam fungsi kontinyu, sehingga tidak ada jaminan bahwa sepanjang garis kurva akan merepresentasikan distribusi pendapatan sebenarnya.

KOEFISIEN GINI

Koefisien Gini dihitung untuk melengkapi analisis Kurva Lorenz. Secara matematis, Koefisien Gini merupakan perbandingan antara wilayah A dan total luas wilayah A dan B.

Nilai Koefisien Gini berkisar antara nol (0) dan satu (1). Semakin kecil nilai Koefisien Gini, semakin kecil pula ketimpangan yang terjadi. Berikut adalah pengklasifikasian Koefisien Gini.

Tabel 2.1. Klasifikasi Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
(1)	(2)
<0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

2.2. LOCATION QUOTIENT

Analisis *location quotient* (LQ) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau *leading sector*. *Location quotient* menghitung perbandingan *share* output sektor-i di kabupaten atau kota dan *share out* sektor-i di provinsi. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah wilayah.

Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan.

Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau

mengukur konsentrasi relative kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai *leading* sektor suatu kegiatan ekonomi industri. Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan.

Teknik LQ belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. Namun untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam sektor yang teridentifikasi. Rumus matematika yang digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor dari wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

Pendekatan Tenaga Kerja:

$$LQ = \frac{L_i/L_t}{N_i/N_t}$$

dengan

L_i : jumlah tenaga kerja sektor-i pada tingkat wilayah yang lebih rendah

L_t : total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih rendah

N_i : jumlah tenaga kerja sektor-i pada tingkat wilayah yang lebih atas

N_t : total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih atas

2. Pendekatan Nilai Tambah/ Pendapatan:

$$LQ = \frac{V_i/V_t}{Y_i/Y_t}$$

dengan

V_i : nilai PDRB sektor-i pada tingkat wilayah yang lebih rendah

V_t : total nilai PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Y_i : nilai PDRB sektor-i pada tingkat wilayah yang lebih atas

Y_t : total nilai PDRB pada tingkat wilayah yang lebih atas

Jika hasil perhitungan di formulasi di samping menghasilkan:

- $LQ > 1$ artinya, komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya

tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.

- $LQ = 1$ komoditas itu tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.
- $LQ < 1$ komoditas ini juga termasuk non-basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan, demikian halnya dengan metode LQ.

Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain:

- LQ merupakan suatu alat analisis yang digunakan dengan mudah dan sederhana, serta cepat penggunaannya.
- LQ dapat digunakan sebagai analisis awal untuk suatu wilayah, kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya.
- Perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun.
- Penerapannya tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Penyelesaian analisis cukup dengan *spread sheet* dari Excel atau program Lotus jika datanya tidak terlalu banyak.

Dari segi keterbatasannya, metode LQ terbatas dalam:

Karena kesederhanaan pendekatan LQ ini, maka yang dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan LQ tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid.

- Pengumpulan data yang sangat valid sangat sulit dilakukan di lapangan sehingga mempersulit pengumpulan data.
- Deliniasi wilayah kajian. Untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas, acuannya sering tidak jelas. Akibatnya hasil hitungan LQ terkadang aneh, tidak sama dengan apa yang kita duga.
- Perlu diketahui bahwa nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias, karena tingkat disagregasi peubah

spesialisasi, pemilihan peubah acuan, pemilihan *entity* yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data.

2.3. TIPOLOGI KLASSEN

Teknik Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) suatu daerah.

Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB. Secara mudahnya, dapat ditunjukkan pada matrik berikut:

Tabel 2.2 Matrik Tipologi Klassen

Kontribusi Laju Pertumbuhan	$s_{ik} > s_i$	$s_{ik} < s_i$
$r_{ik} > r_i$	<u>Kuadran I</u> Daerah maju dan tumbuh pesat	<u>Kuadran III</u> Daerah berkembang
$r_{ik} < r_i$	<u>Kuadran II</u> Daerah potensial	<u>Kuadran IV</u> Daerah relatif tertinggal

Tipologi Klassen juga merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada pengertian ini, Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pertumbuhan pertumbuhan PDRB perkapita daerah dengan PDRB perkapita daerah yang menjadi acuan atau PDRB perkapita secara nasional.

Tabel 2.3. Matriks Strategi Pengembangan Sektor Perekonomian

Jangka Pendek (1-5 tahun)	Jangka Menengah (5-10 tahun)	Jangka Panjang (10-25 tahun)
Daerah yang maju dan tumbuh pesat	<ul style="list-style-type: none"> Daerah berkembang menjadi daerah maju dan tumbuh pesat Daerah relative terbelakang menjadi daerah berkembang 	Daerah berkembang menjadi daerah maju dan tumbuh pesat

Sumber: Widodo (2006) dalam Siti Rahayu (2010)

2.4. INDEKS WILLIAMSON

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan PDRB perkapita. Formula ini pada dasarnya sama dengan *coefficient of variation* (CV) biasa di mana standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Williamson (1965) memperkenalkan CV ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk, yang disebut CVw.

Williamson (1965) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Rumus umum dari Indeks Williamson adalah:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{n_i}{n}}}{\bar{y}}$$

dengan

IW: Indeks Williamson

y_i : PDRB perkapita kabupaten/kota

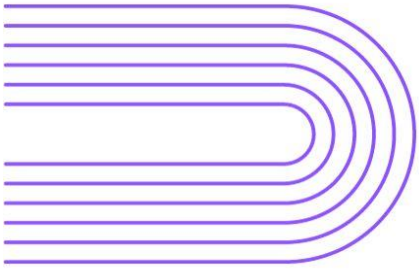
\bar{y} : PDRB perkapita provinsi

n_i : jumlah penduduk kabupaten/kota

n : jumlah penduduk provinsi

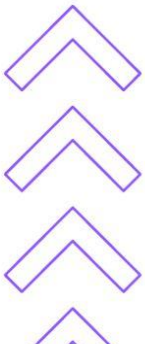
Meskipun Indeks Williamson lazim digunakan untuk mengukur ketimpangan menggunakan variabel ekonomi seperti PDRB, namun Indeks Williamson juga dapat digunakan pada variabel pertanian seperti luas lahan yang dikuasai. Nilai Indeks Williamson (IW) berkisar antara 0 sampai 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) jika nilai IW < 0,3 maka ketimpangan antarwilayah tergolong rendah, yang berarti bahwa pembangunan antar wilayah merata;
- b) jika nilai IW antara 0,3 sampai 0,5, maka ketimpangan antarwilayah tergolong sedang; dan
- c) jika nilai IW > 0,5 atau mendekati satu maka ketimpangan antarwilayah semakin melebar atau tinggi, artinya bahwa pembangunan antarwilayah tersebut tidak merata. Namun, jika nilai IW lebih dari 1 maka pada wilayah tersebut terjadi ketimpangan yang sangat tinggi

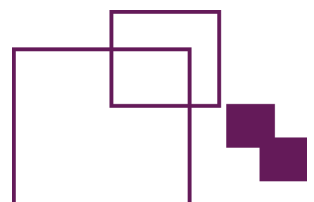


BAB III

Secara topologi, Jawa Tengah juga memiliki dataran tinggi dan dataran rendah sehingga potensi pertanian tidak hanya terbatas pada pertanian tanaman pangan namun juga sesuai untuk horikultura dan perkebunan.



<https://jateng.bps.go.id>



BAB III

POTENSI PERTANIAN JAWA TENGAH

Luas Jawa Tengah mencapai seperempat Pulau Jawa

Pertanian merupakan sektor yang tidak hanya dipengaruhi oleh petani dengan kemampuan bertaninya saja, namun juga sangat bergantung dengan alam, baik berupa alam yang berwujud seperti lahan, air, bentangan hutan dan laut ataupun alam yang hanya bisa dirasa seperti cuaca.

Secara geografis Jawa Tengah sangat diuntungkan karena terletak di pertengahan Pulau Jawa yang memiliki beberapa gunung berapi. Jenis tanah vulkanis sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena kaya akan unsur hara.

Secara topologi, Jawa Tengah juga memiliki dataran tinggi dan dataran rendah sehingga potensi pertanian tidak hanya terbatas pada pertanian tanaman pangan namun juga sesuai untuk horikultura dan perkebunan. Wilayah yang berbatasan dengan laut pun memiliki potensi perikanan yang besar. Pada bab ini akan dijabarkan potensi setiap subkategori pertanian yang telah dihasilkan di Jawa Tengah

3.1. KONDISI UMUM JAWA TENGAH

Jawa Tengah diapit oleh dua provinsi besar lainnya yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Letak Provinsi Jawa Tengah berada antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (Termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Batas-batas administratif Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Laut Jawa dan Pulau Karimunjawa

Sebelah Timur: Provinsi Jawa Timur

Sebelah Selatan: Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebelah Barat: Provinsi Jawa Barat

Menurut Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang, suhu rata-rata di Jawa Tengah Tahun 2022 berkisar antara 22,4 ° C – 33,6 ° C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai memiliki suhu udara rata-rata yang relative tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 78 persen sampai dengan 85 persen. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak tercatat di SMPK Sempor Kebumen yaitu sebesar 4.929 mm³ dan 233 hari.

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta ha atau lebih dari seperempat luas Pulau Jawa. Luas yang ada terdiri dari 991 ribu ha (30,47 persen) lahan sawah dan 2,26 juta ha (69,53 persen) bukan lahan sawah (data tahun 2010). Dibandingkan tahun 2009, luas lahan sawah turun sekitar 0.012 persen dan penggunaan lahan bukan sawah naik 0,006 persen.

Secara umum pemanfaatan lahan di Provinsi Jawa Tengah meliputi 991.524 Ha lahan sawah dengan persentase 30,47 persen dan 2.262.888 Ha lahan bukan sawah dengan persentase 69,53 persen. Penggunaan lahan sawah terbesar adalah sawah irigasi teknis dengan luas 386.953 ha. Selain lahan sawah, pemanfaatan lahan yang lain ialah lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan/bangunan, tegal/kebun, ladang/huma, kolam/empang, tanaman kayu-kayuan dan perkebunan negara/swasta, hutan negara, dan lain-lain.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa sebagian besar lahan di Provinsi Jawa Tengah dimanfaatkan untuk pertanian. Penggunaan lahan pertanian dalam arti luas yaitu meliputi lahan sawah, tegalan, empang, perkebunan adalah sebesar 75,8 persen, dimana 30,47 persen merupakan lahan pertanian tanaman pangan, sehingga dapat diartikan sebagian besar masyarakat Jawa Tengah masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Salah satu penggunaan lahan bukan sawah yang cukup besar adalah pekarangan/bangunan dengan luas 537.288 Ha. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk dan penambahan rumah tangga baru yang menetap di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian sawah atau tegal menjadi pekarangan/bangunan sehingga akan menyebabkan penurunan output di sektor pertanian.

Tabel 3.1. Luas Lahan menurut Penggunaannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Macam Penggunaan	Luas (ha)	Persentase (persen)
1.	Lahan Sawah	991 524	30,47
a.	Sawah irigasi teknis	386 953	11,89
b.	Sawah irigasi ½ teknis	131 687	4,05
c.	Sawah irigasi sederhana	140 423	4,31
d.	Sawah tadah hujan	272 364	8,37
e.	Sawah pengairan desa (non-PU)	57 731	1,77
f.	Sawah pasang surut	1 661	0,05
g.	Lain-lain	705	0,02
2.	Lahan Bukan Sawah	2 262 888	69,53
a.	Pekarangan/bangunan	537 288	16,51
b.	Tegal/kebun	723 056	22,22
c.	Ladang/huma	11 664	0,36
d.	Padang rumput	1 745	0,05
e.	Sementara tidak diusahakan	1 429	0,04
f.	Hutan rakyat	103 004	3,17
g.	Hutan Negara	567 449	17,44
h.	Perkebunan Negara/swasta	71 337	2,19
i.	Rawa-rawa	9 021	0,28
j.	Tambak	37 574	1,15
k.	Kolam/Empang	3 046	0,09
l.	Lain-lain	196 275	6,03
Total		3 254 412	100,00

Sumber: Tabel statis, Luas Lahan Menurut Penggunaan, 2010

Oleh karena itu, perlu adanya usaha dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan output di sektor pertanian terutama sektor tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan intensifikasi pertanian dan pembatasan alih fungsi lahan

pertanian yang diharapkan dapat menambah dan mempertahankan output pertanian guna memenuhi ketersediaan pangan penduduk.

3.2. POTENSI PERTANIAN BERDASARKAN SUBKATEGORI PERTANIAN DAN WILAYAH PEMBANGUNAN

Nilai PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2022 mencapai 1.420,80 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 72,88 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 1.347,92 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari 965,23 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 997,32 triliun rupiah di tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022, Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,32 persen, menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Pertanian sebagai penyumbang terbesar kedua perekonomian Jawa Tengah setelah Industri Pengolahan

Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Jawa Tengah Selatan didominasi oleh 4 kategori lapangan usaha diantaranya Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Konstruksi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, sementara posisi kedua adalah perdagangan, pertanian dan konstruksi.

3.2.1. TANAMAN PANGAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan penghasil tanaman pangan unggulan di Pulau Jawa dengan komoditas utama padi. Pasokan tanaman pangan tertinggi di tahun 2012 berasal dari WP Subosukawonosraten, setelah 10 tahun kemudian WP Subosukawonosraten masih menjadi pemasok tertinggi tanaman pangan di Jawa Tengah.

Tabel 3.2. Rata-rata PDRB Tanaman Pangan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012 dan 2022

Wilayah Pembangunan	PDRB		Andil	
	2012	2022	2012	2022
Barlingmascakeb	8.820.690,34	10.225.746,68	18,52	16,71
Purwomanggung	4.562.337,95	5.324.238,35	9,58	8,70
Subosukowonosraten	10.822.193,1	14.051.502,62	22,72	22,97
Banglor	3.162.625,9	4.300.484,99	6,64	7,03
Wanarakuti	4.496.348,8	6.541.176,69	9,44	10,69
Kedungsepur	8.462.780,4	11.783.495,77	17,77	19,26
Petanglong	1.784.674,4	2.237.572	3,75	3,66
Bregasmalang	5.279.970,2	6.892.702	11,09	11,27
Jawa Tengah	47.391.621,2	61.356.919,1	100	100

3.2.2. HORTIKULTURA

Selain tanaman pangan, Jawa Tengah juga penghasil produk tanaman hortikultura. Penyumbang hortikultura terbesar di tahun 2012 adalah WP Bregasmalang yang andilnya melebihi seperempat pasokan.

Komoditas hortikultura utama adalah bawang merah dari Kabupaten Brebes yang merupakan produk unggulan Jawa Tengah, setelah 10 tahun kemusiaan WP Bregasmalang masih menjadi pemasok komoditas hortikultura bahkan melebihi 40 persen.

Tabel 3.3. Rata-rata PDRB Hortikultura dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022

Wilayah Pembangunan	PDRB		Andil	
	2012	2022	2012	2022
Barlingmascakeb	4.993.635,9	2.125.677	18,02	10,51
Purwomanggung	4.973.224,1	2.678.374	17,95	13,24
Subosukowonosraten	2.731.866,2	1.590.077	9,86	7,86
Banglor	1.548.597,3	568.450	5,59	2,81
Wanarakuti	1.951.903,6	2.163.599	7,04	10,70
Kedungsepur	2.844.128,7	1.887.816	10,26	9,33
Petanglong	1.013.758,4	1.032.515	3,66	5,11
Bregasmalang	7.762.949,1	8.177.689	28,02	40,44
Jawa Tengah	27.708.277,76	20.223.184,4	100	100

3.2.3 PERKEBUNAN

Perkebunan sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah melalui beberapa komoditas seperti kelapa, karet, kopi, kakao dan tebu.

Penyumbang komoditas perkebunan terbanyak adalah WP Barlingmascakeb dengan kontribusi yang cukup besar. Setelah 10 tahun kemudian WP Barlingmascakeb masih menjadi pemasok komoditas perkebunan tertinggi.

Kontribusi sektor kehutanan yang terbesar disumbang oleh WP Barlingmascakeb sebesar 18 persen, setelah 10 tahun kemudian WP Barlingmascakeb masih menjadi pemasok tertinggi komoditas kehutanan di Jawa Tengah.

Tabel 3.4. Rata-rata PDRB Perkebunan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022

Wilayah Pembangunan	PDRB ADHB		Andil	
	2012	2022	2012	2022
Barlingmascakeb	3.679.868,7	15.809.187,1	32,59	25,05
Purwomanggung	1.286.962,3	10.130.167,6	11,40	16,03
Subosukowonosraten	1.436.420,5	7.287.401,09	12,72	11,55
Banglor	278.463,51	3.133.944,65	2,47	4,97
Wanarakuti	1.677.481,8	5.131.437,26	14,86	8,13
Kedungsepur	978.739,93	6.062.688,79	8,67	9,61
Petanglong	1.081.716,6	3.094.572,56	9,58	4,90
Bregasmalang	870.507,45	1.0476.672,3	7,71	16,60
Jawa Tengah	1.129.324,6	63.108.763,52	100	100

3.2.4. PETERNAKAN

Tabel 3.5. Rata-rata PDRB Peternakan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022

Wilayah Pembangunan	PDRB ADHB		Andil	
	2012	2022	2012	2022
Barlingmascakeb	3.252.087	7.021.480	17,66	18,04
Purwomanggung	1.988.467	4.024.199	10,80	10,34
Subosukowonosraten	5.045.048	11.249.515	27,39	28,90
Banglor	562.553	1.098.596	3,05	2,82
Wanarakuti	983.162	2.121.697	5,34	5,45
Kedungsepur	4.331.858	8.793.438	23,52	22,59
Petanglong	665.168	1.387.725	3,61	3,56
Bregasmalang	1.587.858	3.316.411	8,62	8,52
Jawa Tengah	18.416.201	39.013.061	100	100

Populasi ternak paling banyak di Jawa Tengah didominasi oleh ternak besar yakni sapi. Kontribusi terbesar untuk peternakan adalah WP Subosukowosraten dengan kontribusi 27 persen, setelah 10 tahun kemudian WP Barlingmascakeb masih menjadi pemasok tertinggi komoditas peternakan di Jawa Tengah.

3.2.5. KEHUTANAN

Sektor kehutanan mempunyai hubungan penting dengan sektor pertanian, karena hutan yang terjaga akan menjaga suplai air yang akan menjaga produksi pertanian. Hutan mempunyai fungsi sebagai penghasil komoditi kayu, wisata alam dan sebagai penyeimbang lingkungan. Kawasan hutan di Jawa Tengah mencapai 625.096 Ha dengan porsi 64,36 persen diperuntukkan sebagai hutan produksi, 17,72 persen untuk kawasan perlindungan, 13,45 persen untuk hutan lindung, dan sisanya untuk kepentingan lainnya.

Tabel 3.6. Rata-rata PDRB Kehutanan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022

Wilayah Pembangunan	PDRB		Andil	
	2012	2022	2012	2022
Barlingmascakeb	846.292	1.153.021	18,80	17,20
Purwomanggung	637.938	1.011.753	14,17	15,10
Subosukowonosraten	492.070	843.977	10,93	12,59
Banglor	716.098	1.107.348	15,91	16,52
Wanarakuti	174.176	280.603	3,87	4,19
Kedungsepur	630.316	982.145	14,01	14,65
Petanglong	312.487	502.231	6,94	7,49
Bregasmalang	686.286	1.097.350	15,25	16,37
Jawa Tengah	4.500.609	6.702.431	100	100

Kontribusi sektor kehutanan yang terbesar disumbang oleh WP Barlingmascakeb sebesar 18 persen, setelah 10 tahun kemudian WP Barlingmascakeb masih menjadi pemasok tertinggi komoditas kehutanan di Jawa Tengah.

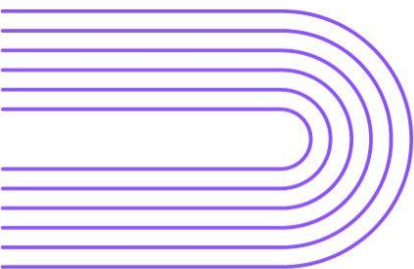
3.2.6. PERIKANAN

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi luar biasa dalam sektor perikanan. Total volume perikanan tangkap propinsi tersebut secara nasional sebesar 333 ribu ton dengan nilai Rp 4,7 triliun.

Potensi sumber daya perikanan di provinsi tersebut sebetulnya masih sangat besar, namun tantangannya juga tidak kalah besar. Kontribusi perikanan terbanyak disumbang oleh WP Barlingmascakeb dengan share 17 persen, setelah 10 tahun kemudian WP Barlingmascakeb masih menjadi pe masuk tertinggi komoditas kehutanan di Jawa Tengah dengan share tetap berada di angka 17 persen.

Tabel 3.7. Rata-rata PDRB Perikanan dan Andil per Wilayah Pembangunan, 2012-2022

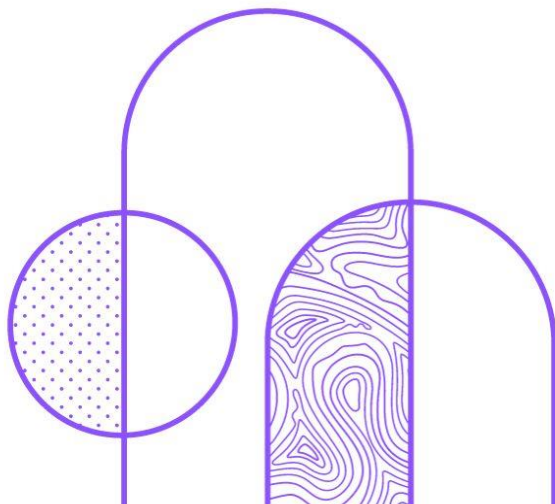
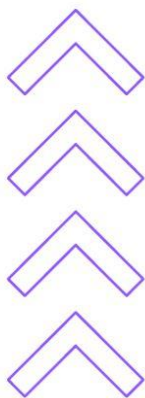
Wilayah Pembangunan	PDRB		Andil	
	2012	2022	2012	2022
Barlingmascakeb	1.353.029,87	3.011.764,42	17,51	17,65
Purwomanggung	434.877,58	852.424,88	5,63	5,00
Subosukowonosraten	1.152.428,11	2.512.657,66	14,91	14,72
Banglor	674.453,84	1.261.325,04	8,73	7,39
Wanarakuti	1.137.702,16	2.758.978,91	14,72	16,17
Kedungsepur	1.065.168,48	2.230.600,62	13,78	13,07
Petanglong	725.028,59	1.404.802,70	9,38	8,23
Bregasmalang	1.189.092,09	2.660.389,04	15,39	15,59
Jawa Tengah	7.731.780,71	16.692.943,26	100	100



BAB IV

Kesenjangan atau ketimpangan antarwilayah merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

<https://jateng.bps.go.id>



<https://jateng.bps.go.id>

BAB IV

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH

Proses pembangunan memiliki cita-cita besar yakni peningkatan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan biasanya diukur dengan variable ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, tak terkecuali dilapangan ushaa pertanian. Sebagai salah satu lapangan usaha utama di Jawa Tengah, sudah selayaknya pertanian mendapatkan perhatian yang layak. Tak hanya sebagai poros perekonomian, sektor pertanian juga menyumbangkan angka kemiskinan yang tidak sedikit.

Kesenjangan atau ketimpangan antarwilayah merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan dan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah. Kebijakan pembangunan perlu secara berkala dievaluasi agar hasilnya tidak hanya meninggikan angka pertumbuhan namun juga mengurangi ketimpangan.

Pada bagian ini akan dijabarkan beberapa ukuran ketimpangan yang berkaitan dengan variabel pertanian seperti ketimpangan dalam penguasaan lahan dan pendapatan. Selain itu juga dijelaskan kekuatan masing-masing wilayah dalam sektor pertanian serta klasifikasi pembanguann pertanian di masing-masing wilayah.

4.1. KLASIFIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintahan daerah dan komponen masyarakat mengelola sumber daya dengan membentuk pola kemitraan guna untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi (Blakely,1994). Soetriono dan Wibowo (2002:57) menyatakan bahwa klasifikasi wilayah merupakan suatu landasan yang sangat penting dalam perencanaan

pembangunan yang dilakukan pada wilayah yang berkaitan guna untuk mengetahui variasi karakteristik dalam wilayah tertentu.

Menurut Royat dalam Kuncoro (2002:28) bahwa wilayah andalan merupakan suatu wilayah yang ditetapkan sebagai penggerak utama perekonomian daerah, yang memiliki kriteria sebagai wilayah yang cepattumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar. Perbedaan wilayah berarti menandakan perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang mempunyai keterbatasan dan hambatan dari pemerintah akibat akses lingkungan yang berbeda. Pemerintah harus terus menggali potensi ekonomi yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai yang diharapkan yaitu demi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.

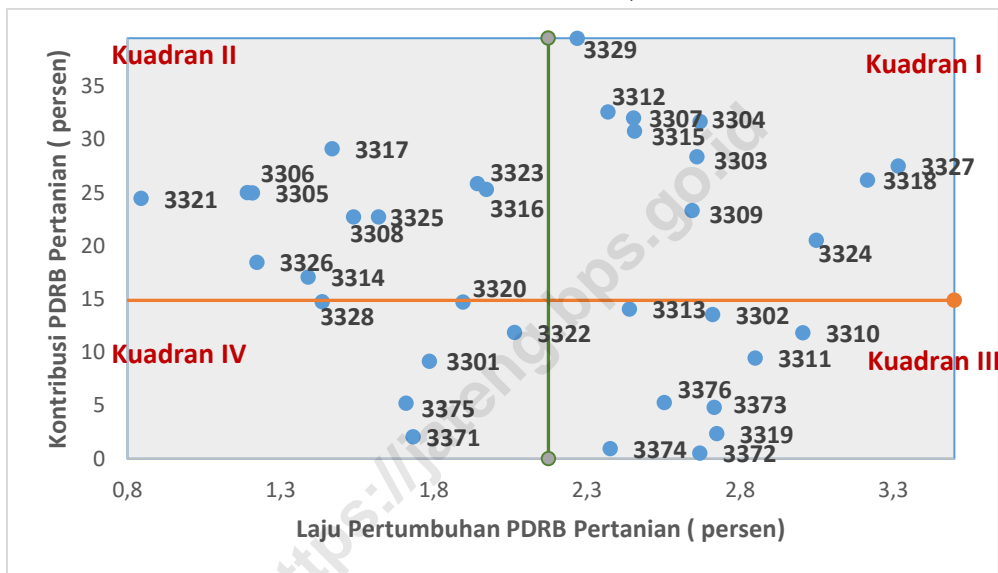
Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dengan membagi daerah berdasarkan indikator laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi ekonomi. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk menganalisis perkembangan pertanian Provinsi Jawa Tengah. Tipologi Klassen membagi wilayah menjadi empat yakni kuadran I adalah sektor pertanian maju dan cepat tumbuh, kuadran II adalah sektor pertanian maju tapi tertekan, kuadran III merupakan sektor pertanian berkembang cepat, dan kuadran IV adalah sektor pertanian relatif tertinggal. Hasil pembagian Tipologi Klassen di Jawa Tengah berdasarkan PDRB lapangan usaha pertanian disajikan pada Gambar 4.1.

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat terlihat bahwa terdapat sepuluh wilayah yang merupakan daerah pertanian maju dan tumbuh pesat, sembilan wilayah yang masuk ke kuadran II, sembilan wilayah masuk ke kuadran III, enam. Berdasarkan Gambar di atas, dapat terlihat bahwa terdapat sepuluh wilayah yang merupakan daerah pertanian maju dan tumbuh pesat, sembilan wilayah yang masuk ke kuadran II, sembilan wilayah masuk ke kuadran III, enam wilayah masuk ke kuadran IV.

Jika dilihat per wilayah pembangunan, WP Barlingmascakeb menyebar di 3 kuadran. Purbalingga dan Banjarnegara masuk dalam kuadran I yakni pertanian maju dan cepat tumbuh, Kebumen masuk ke kuadran II yakni wilayah pertanian maju namun tertekan, Banyumas masuk dalam kuadran III yakni wilayah pertanian berkembang cepat, sementara Cilacap masuk dalam kuadran IV yakni pertanian relatif tertinggal.

Pertanian Barlingmascakeb secara umum memberikan kontribusi yang besar dalam pertanian karena menjadi penyumbang besar pada beberapa subkategori pertanian. Pertanian Cilacap pada dasarnya juga berkembang dengan baik, namun share pertanian dikalahkan oleh industri minyak dan gas. Sehingga analisis pertanian yang lebih tepat dapat diaplikasikan untuk PDRB Cilacap tanpa migas.

Gambar 4.1. Hasil Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasarkan PDRB Pertanian, 2012-2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah

Sementara itu di WP Purwomanggung, wilayah-wilayahnya tersebar di tiga kuadran. Wonosobo merupakan wilayah andalan pertanian dan masuk kuadran I, Temanggung, Purworejo, dan Kabupaten Magelang masuk ke kuadran II dimana kontribusi pertanian besar namun pertumbuhannya masih potensial untuk ditingkatkan, sementara Kota Magelang masuk ke kuadran IV di mana pertanian bukan merupakan sektor yang unggulan di sana. Purwomanggung merupakan kontributor besar dalam penyuplai komoditas hortikultura dan perkebunan di Jawa Tengah.

Wilayah pembangunan dengan anggota kabupaten/kota terbanyak adalah WP Subosukowonosraten. Wilayahnya tersebar di 3 kuadran selain kuadran IV. Boyolali dan Wonogiri masuk ke kuadran I, Sragen masuk ke kuadran II, sementara Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Kota Surakarta masuk ke kuadran III. Tidak ada wilayah di WP ini yang masuk ke kuadran

IV, hal ini menunjukkan bahwa WP ini sangat potensial untuk menyumbang pertanian di Jawa Tengah.

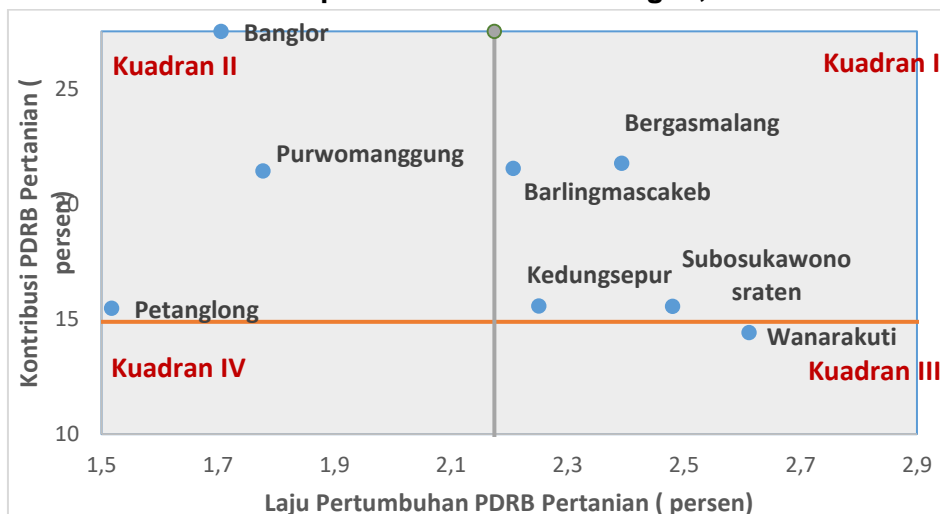
Berkebalikan dengan WP Subosukowonosraten, WP Banglor hanya beranggotakan dua wilayah dan keduanya masuk ke dalam kuadran II, yakni wilayah pertanian maju namun tertekan. Share pertanian di Kabupaten Blora dan Rembang masuk kategori besar namun pertumbuhannya bisa lebih ditingkatkan lagi.

WP Wanarakuti terdiri dari tiga daerah yang berada di kuadran I dan III. Kabupaten Pati masuk ke kuadran I, Kabupaten Kudus masuk ke kuadran III, sementara Jepara masuk ke Kuadran IV. Kontribusi WP Wanarakuti untuk pertanian Jawa tengah besar di subsektor perikanan dan perkebunan.

WP Kedungsepur, wilayahnya tersebar. Kendal dan Grobogan berada pada kuadran I, Demak berada pada kuadran II, Kabupaten Semarang berada di kuadran IV, sementara daerah lain berada di kuadran III. Kontribusi WP Kedungsepur untuk pertanian Jawa Tengah besar di subsektor tanaman pangan dan peternakan.

WP Petanglong yang dikenal sebagai daerah industri dan perdagangan menempati kuadran II dan IV. Untuk WP Bregasmalang, wilayahnya tersebar di kuadran I, III, dan IV. Kabupaten Brebes memiliki posisi tertinggi di kuadran I dengan kontribusi terbesar pada subsektor hortikultura.

Gambar 4.2. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Lapangan Usaha Pertanian Kabupaten Kota di Jawa Tengah, 2012-2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah0

Jika dilihat secara keseluruhan, tidak ada kawasan wilayah pembangunan yang masuk ke dalam kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap keseluruhan pertanian di Indonesia.

Dari Gambar 4.2 di atas, terlihat bahwa hanya terdapat 1 wilayah yang berada di kuadran III, yakni Wanarakuti yang merupakan wilayah dengan kontribusi PDRB Pertanian rendah tetapi laju pertumbuhan yang tinggi.

Sementara itu, wilayah Bergasmalang, Barlingmascakeb, Kedungsepur, dan Subosukawonosraten masuk ke dalam kuadran I. Wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kuadran I dapat menjadi wilayah pembangunan pertanian andalan di Provinsi Jawa Tengah.

4.2. IDENTIFIKASI SUBSEKTOR ANDALAN

Sektor perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah sektor yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan lokal serta mampu mengekspor ke luar wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan sektor non-basis merupakan sektor yang hanya mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan lokal saja serta belum mampu mengekspor ke luar wilayah yang bersangkutan.

Jawa Tengah dalam menjalankan perekonomian ditopang oleh 17 kategori lapangan usaha yakni pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air; pengolahan sampah; limbah; dan daur ulang, kontruksi, perdagangan besar dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa

perusahaan, kegiatan administrasi pemerintahan; pertahanan; dan jaminan sosial wajib, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Hasil dari analisis Location Quotient (LQ) untuk kategori

perekonomian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Lapangan Usaha Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, 2012-2022

Lapangan Usaha	LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,240	Basis
Pertambangan dan Penggalian	1,210	Basis
Industri Pengolahan	0,772	Non-basis
Pengadaan Listrik dan Gas	1,094	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,061	Basis
Konstruksi	0,865	Non-basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,107	Basis
Transportasi dan Pergudangan	1,162	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,145	Basis
Informasi dan Komunikasi	0,883	Non-basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,068	Basis
Real Estate	1,022	Basis
Jasa Perusahaan	0,012	Non-basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,182	Basis
Jasa Pendidikan	1,226	Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,232	Basis
Jasa lainnya	1,185	Basis

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah

Berdasarkan hasil analisis LQ terhadap 17 lapangan usaha perekonomian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2022 menunjukkan bahwa dari 17 lapangan usaha, 76 persen merupakan sektor basis dan hanya menyisakan 4 lapangan usaha yang merupakan non-basis, yakni Industri pengolahan, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Perusahaan.

Lapangan usaha yang memiliki nilai LQ > 1 dikatakan memiliki daya saing tinggi karena selain dapat memenuhi kebutuhan wilayah sendiri juga

dapat mengekspor produknya keluar wilayah. Dari hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa lapangan usaha pertanian di Jawa Tengah selama tahun 2012-2022 menjadi sektor basis dalam perekonomian. wilayah basis pertanian, sementara Bregasmalang masih konsisten menjadi wilayah basis pertanian.

Jika dilihat dari nilai LQ, tidak ada besaran nilai LQ yang lebih besar dari 2. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah basis pertanian hanya berstatus kuat, tidak ada yang berstatus sangat kuat. Berbeda halnya jika dianalisis per kabupaten/kota secara terpisah, maka beberapa wilayah merupakan wilayah berstatus basis pertanian sangat kuat seperti Kabupaten Brebes, Wonogiri, Wonoso, Banjarnegara, dan Grobogan.

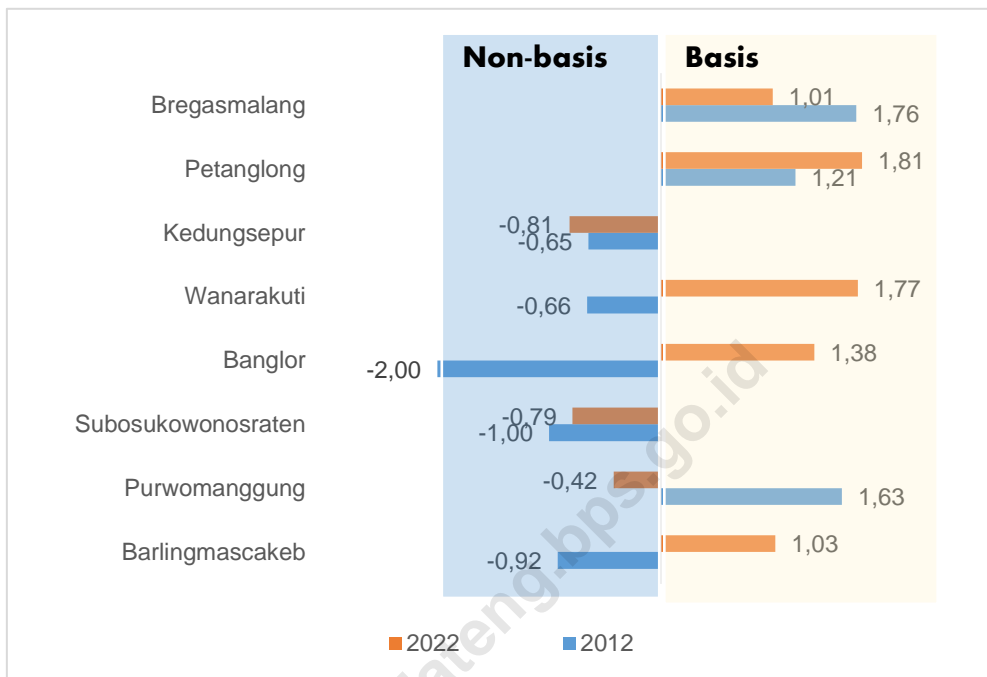
Wilayah basis pertanian ditunjukkan dengan nilai $LQ > 1$ menggambarkan kemampuan wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya sendiri. Pada analisis wilayah pembangunan, hanya dua wilayah yang berstatus basis pertanian kuat di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa antarwilayah di Jawa Tengah memiliki ketergantungan untuk penyediaan komoditas pertanian. Hal ini juga memiliki makna bahwa setiap wilayah pembangunan memiliki karakteristik pertaniannya masing-masing sehingga dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan/hasil pertanian secara menyeluruh membutuhkan transaksi antarwilayah.

Pada bagian selanjutnya akan dilihat basis pertanian wilayah pembangunan secara lebih rinci yakni dari sisi subkategori pertanian.

Meskipun pertanian merupakan sektor basis di Jawa Tengah, namun tidak semua wilayah pembangunan di Jawa Tengah memiliki pertanian sebagai sektor basis. Oleh karena itu, dihitung juga LQ untuk masing-masing wilayah pembangunan dalam rangka identifikasi pertanian sebagai sektor basis.

Berdasarkan analisis LQ pada tahun 2012 dan 2022, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2012 terdapat 3 wilayah pembangunan yang merupakan basis pertanian yakni Purwomanggung, Petanglong, dan Bregasmalang. Satu dasawarsa kemudian, Purwomanggung tidak lagi menjadi basis pertanian di Jawa Tengah.

Gambar 4.3. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Lapangan Usaha Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012-2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto masing-masing kabupaten/kota menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah

Berdasarkan analisis LQ pada tahun tahun 2012 dan 2022, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2012 terdapat 3 wilayah pembangunan yang merupakan basis pertanian yakni Purwomanggung, Petanglong, dan Bregasmalang. Satu dasawarsa kemudian, Purwomanggung tidak lagi menjadi basis pertanian di Jawa Tengah.

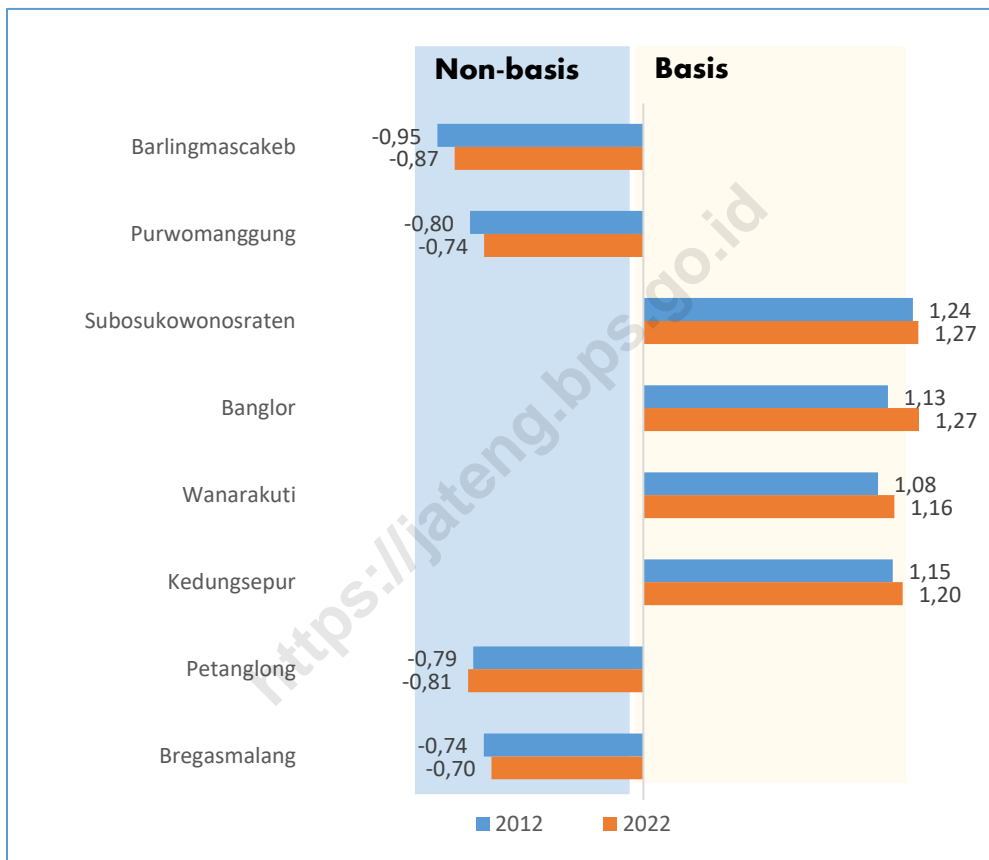
4.2.1. WILAYAH BASIS TANAMAN PANGAN

Tanaman pangan terdiri dari padi, palawija, serta kacang-kacangan. Pada tahun 2022, Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai salah satu daerah penyumbang produksi beras terbesar di Indonesia. Dengan analisis LQ, akan dilihat wilayah di Jawa Tengah yang secara spesifik menjadi wilayah berbasis tanaman pangan.

Penghitungan LQ dilakukan pada 2 titik yakni 2012 dan 2022 dan dilihat perubahannya. Hasil LQ tanaman pangan menunjukkan bahwa terdapat 4

wilayah pembangunan yang merupakan wilayah basis tanaman pangan di tahun 2012 yakni Subosukowonosraten, Banglor, Wanarakuti, dan Kedungsepur.

Gambar 4.4. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Subkategori Tanaman Pangan Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto masing-masing kabupaten/kota menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah

Kondisi ini tidak berubah di tahun 2022. Keempat wilayah pembangunan tersebut masih konsisten menjadi wilayah basis tanaman pangan. Posisi keempat wilayah basis tanaman pangan memiliki nilai LQ yang berdekatan, menunjukkan bahwa tidak ada wilayah pembangunan yang sangat dominan.

Jika dilihat dengan kesesuaian antara nilai LQ dan kontribusi tanaman pangan, maka Wilayah Pembangunan Subosukowonosraten dan Kedungsepur bersesuaian. Tidak hanya kontribusi tanaman pangan yang

Wilayah di Jawa Tengah yang memiliki basis tanaman pangan yang sangat kuat adalah Kab. Grobogan

tinggi di Jawa Tengah, namun juga menjadi wilayah basis pertanian tanaman pangan. Namun, WP Banglor dan Wanarakuti tidak memiliki kontribusi yang tinggi pada kategori tanaman pangan.

Di satu sisi, WP Bregasmalang dan Barlingmascakeb memiliki kontribusi besar di pertanian tanaman pangan Jawa Tengah, namun tidak masuk dalam wilayah basis pertanian tanaman pangan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tertutupnya share pertanian oleh kategori lain seperti industri minyak bumi.

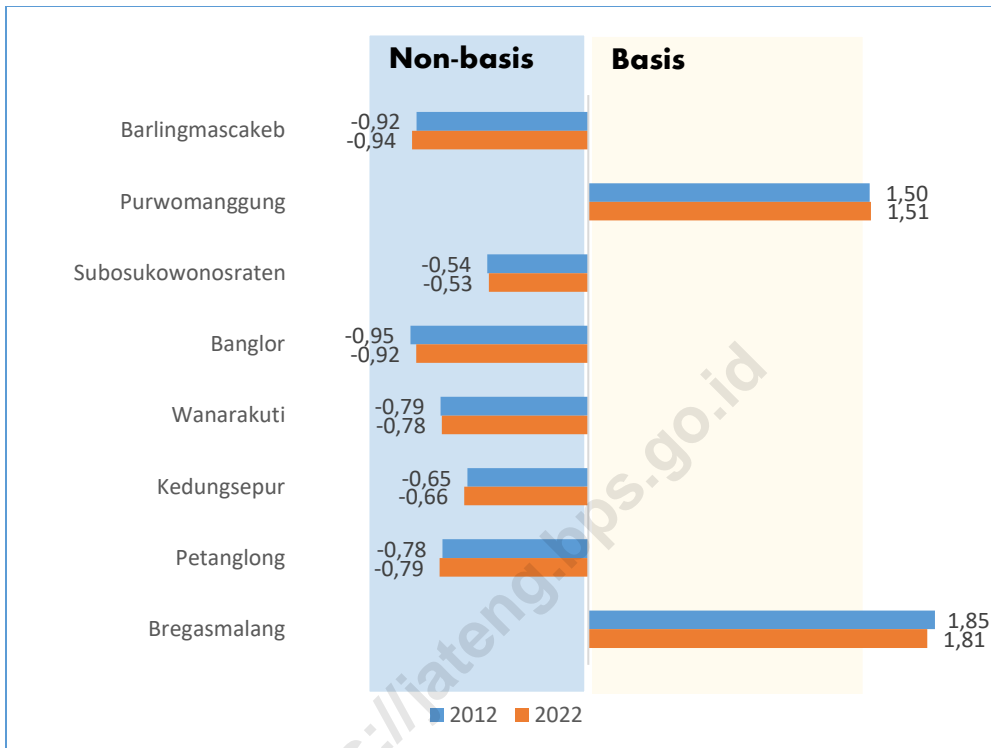
Sementara itu, WP Banglor dan WP Wanarakuti termasuk yang menjadi wilayah basis pertanian tanaman pangan namun tidak memiliki kontribusi yang besar untuk pertanian tanaman pangan Jawa Tengah, Hal ini dikarenakan WP tersebut hanya beranggotakan sedikit wilayah dibandingkan dengan WP lainnya.

4.2.2 WILAYAH BASIS HORTIKULTURA

Subkategori hortikultura terdiri dari hortikultura semusim dan hortikultura tahunan. Selain sebagai lumbung tanaman pangan, Jawa Tengah juga dikenal sebagai lumbung hortikultura. Produk unggulan dari Jawa Tengah di antaranya durian, alpukat, mangga, pisang, melon, dan semangka (Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian). Pada tahun 2022, produksi buah-buahan Jawa Tengah berkontribusi 12,5 persen terhadap produksi buah nasional.

Dengan analisis LQ, akan dilihat wilayah di Jawa Tengah yang secara spesifik menjadi wilayah berbasis hortikultura. Penghitungan LQ dilakukan pada 2 titik yakni 2012 dan 2022 dan dilihat perubahannya. Hasil LQ hortikultura menunjukkan bahwa terdapat 2 wilayah pembangunan yang

Gambar 4.5 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Subkategori Hortikultura Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto masing-masing kabupaten/kota menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah

Wilayah basis hortikultura di tahun 2012 yakni wilayah pembangunan Purwomanggung dan Bregasmalang. Kondisi ini tidak berubah di tahun 2022. Kedua wilayah pembangunan tersebut masih konsisten menjadi wilayah basis hortikultura. Posisi kedua wilayah basis hortikultura memiliki nilai LQ yang berdekatan, menunjukkan bahwa tidak ada wilayah pembangunan yang sangat dominan.

Wilayah di Jawa Tengah yang memiliki basis hortikultura yang sangat kuat adalah Kab. Brebes

Jika dilihat dengan kesesuaian antara nilai LQ dan kontribusi hortikultura, maka WP Purwomanggung dan Bregasmalang bersesuaian. Tidak hanya kontribusi hortikultura yang tinggi di Jawa Tengah, namun juga menjadi wilayah basis pertanian hortikultura.

Kontribusi Bregasmalang menduduki peringkat tertinggi sekaligus secara nilai LQ

menunjukkan basis terkuat hortikultura di Jawa Tengah. Fenomena ini ditopang oleh Brebes yang merupakan penghasil komoditas hortikultura utama di Jawa Tengah.

4.2.3. WILAYAH BASIS PERKEBUNAN

Wilayah di Jawa Tengah yang memiliki basis perkebunan yang sangat kuat adalah Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Jepra dan Kab. Pekalongan

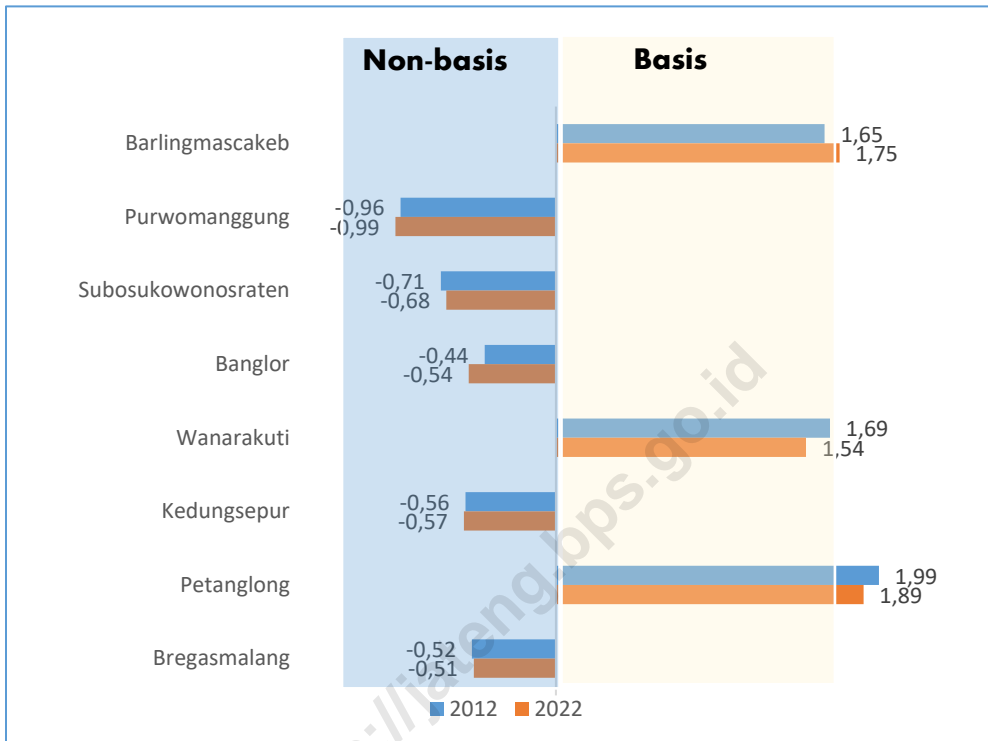
Subkategori perkebunan terdiri dari perkebunan semusim dan perkebunan tahunan. Peranan perkebunan dalam perekonomian Jawa Tengah memang tidak cukup besar, yakni sebesar 1,49 persen di tahun 2012 dan 1,34 persen di tahun 2022. Meskipun demikian, perkebunan teh di Jawa Tengah merupakan yang terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Hasil LQ wilayah basis perkebunan per wilayah pembangunan disajikan pada diagram berikut. Dengan analisis LQ, akan dilihat wilayah di Jawa Tengah yang secara spesifik menjadi wilayah berbasis perkebunan. Penghitungan LQ dilakukan pada 2 titik yakni 2012 dan 2022 kemudian dilihat perubahannya. Hasil LQ perkebunan menunjukkan bahwa terdapat 3 wilayah pembangunan yang menjadi basis wilayah perkebunan yakni Barlingmascakeb, Wanarakuti, dan Petanglong. Kondisi ini tidak berubah di tahun 2022. Ketiga wilayah pembangunan tersebut masih konsisten menjadi wilayah basis perkebunan. Posisi ketiga wilayah basis perkebunan tersebut memiliki nilai LQ yang berdekatan, menunjukkan bahwa tidak ada wilayah pembangunan yang sangat dominan.

Jika dilihat dengan kesesuaian antara nilai LQ dan kontribusi perkebunan, maka Wilayah Pembangunan Barlingmascakeb bersesuaian. Tidak hanya kontribusi perkebunan yang tinggi di Jawa Tengah, namun juga menjadi wilayah basis perkebunan di Jawa Tengah. Namun, WP Wanarakuti dan Petanglong tidak memiliki kontribusi yang tinggi pada kategori tanaman pangan.

Berdasarkan Nugroho et al. (2017), Kabupaten Cilacap memiliki topografi yang bervariasi sehingga cocok untuk pertumbuhan tanaman perkebunan. Komoditas perkebunan basis yang terdapat di Cilacap antara lain kelapa deres, karet, dan pala.

Gambar 4.6 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Subkategori Perkebunan Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto masing-masing kabupaten/kota menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah

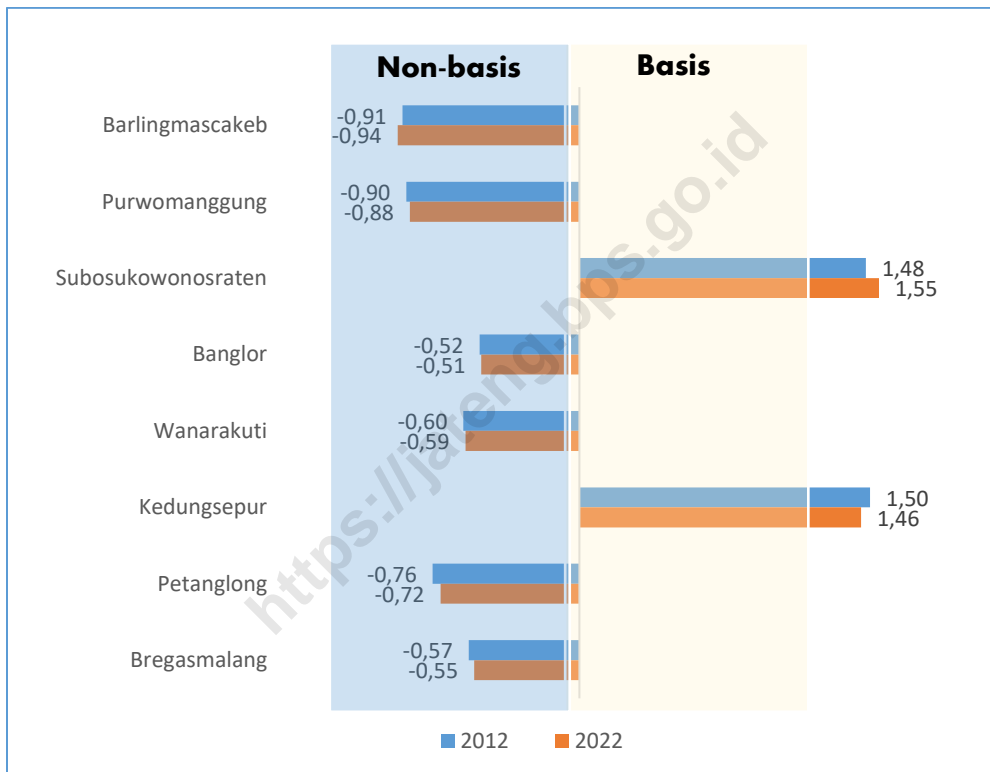
Sementara penelitian Haryono (2018) menyatakan bahwa komoditas perkebunan unggulan dan strategis di Banyumas adalah teh, cengkeh, lada, dan aren. Wati (2019) dengan analisis LQ per kecamatan mendapatkan hasil bahwa komoditas perkebunan basis untuk Kabupaten Pekalongan adalah cengkeh, kopi, teh, dan glagah arjuno.

4.2.4 WILAYAH BASIS PETERNAKAN

Subkategori peternakan terdiri dari pengusaha ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Peranan peternakan dalam perekonomian Jawa Tengah relatif kecil yakni sebesar 2,44 persen di tahun 2012 dan 2,49 persen di tahun 2022. Namun perlu dicatat bahwa peternakan sapi Jawa Tengah merupakan salah satu penghasil sapi terbesar di Indonesia dan memiliki populasi sapi terbanyak kedua setelah Jawa Timur. Berikut adalah hasil analisis LQ wilayah basis

peternakan wilayah pembangunan di Jawa Tengah. Hasil LQ wilayah basis peternakan per wilayah pembangunan disajikan pada diagram berikut. Dengan analisis LQ, akan dilihat wilayah di Jawa Tengah yang secara spesifik menjadi wilayah berbasis peternakan.

Gambar 4.7. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Subkategori Peternakan Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto masing-masing kabupaten/kota menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah

Penghitungan LQ dilakukan pada 2 titik yakni 2012 dan 2022 dan dilihat perubahannya. Hasil LQ peternakan menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah pembangunan yang menjadi basis wilayah peternakan, yaitu Subosukowonosraten dan Kedungsepur. Posisi kedua wilayah basis peternakan memiliki nilai LQ yang berdekatan, menunjukkan bahwa tidak ada wilayah pembangunan yang sangat dominan.

Wilayah di Jawa Tengah yang memiliki basis peternakan yang sangat kuat adalah Kab. Sukoharjo, Kab. Kendal, dan Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

Jika dilihat dengan kesesuaian antara nilai LQ dan kontribusi peternakan, maka WP Subosukowonosraten dan Kedungsepur bersesuaian. Tidak hanya kontribusi peternakan yang tinggi di Jawa Tengah, namun juga menjadi wilayah basis peternakan di Jawa Tengah. Kontribusi peternakan Subosukowonosraten menjadi yang terbesar untuk komoditas peternakan di Jawa Tengah, hingga hampir mencapai 30

persen.

Beberapa wilayah di WP Subosukowonosraten memang merupakan basis peternakan yang sangat kuat antara lain Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Hal ini didukung oleh adanya program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) yang dilaksanakan sejak tahun 2016.

4.2.5 WILAYAH BASIS JASA PERTANIAN

Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah yang memiliki basis jasa pertanian yang paling kuat adalah Bregasmalang

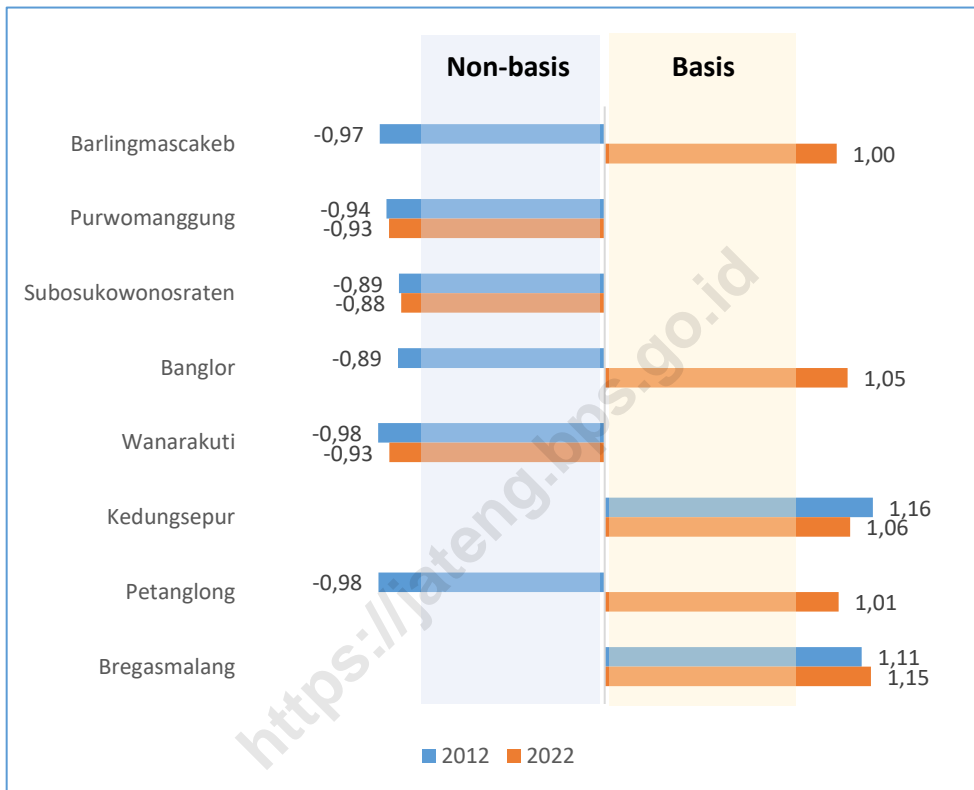
Subkategori jasa pertanian ini mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.

Berdasarkan SUTAS 2018, jumlah rumah tangga usaha pertanian pada subsektor jasa pertanian Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat kedua. Pada tahun 2022, Jawa Tengah juga menjadi provinsi dengan jumlah Usaha Pertanian Lainnya pada subsektor jasa pertanian terbanyak.

Penghitungan LQ dilakukan pada 2 titik yakni 2012 dan 2022 dan dilihat perubahannya. Hasil LQ jasa pertanian menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah pembangunan pada tahun 2012 yang menjadi basis wilayah jasa pertanian, yaitu Kedungsepur dan Bregasmalang. Pada tahun 2022, dua wilayah pembangunan tersebut tetap menjadi basis dan wilayah

pembangunan Banglor, Petanglong, dan Barlingmascakeb juga menjadi basis jasa pertanian.

Gambar 4.8. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Subkategori Jasa Pertanian Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022



Nilai LQ dari setiap wilayah basis tidak berbeda jauh. Walaupun begitu, Bregasmalang menjadi wilayah pembangunan yang berstatus paling kuat untuk basis jasa pertanian pada tahun 2012 maupun 2020.

Hal ini selaras dengan nilai LQ dari setiap kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes, Tegal, Pekalongan, dan Pemalang memiliki nilai LQ jasa pertanian yang mendekati 1 bahkan di atas 1. Hanya Kota Tegal yang memiliki nilai LQ jasa pertanian jauh kurang dari 1.

4.2.6. WILAYAH BASIS KEHUTANAN

Wilayah
Pembangunan di
Jawa Tengah yang
memiliki basis
kehutanan yang
sangat kuat adalah
Banglor

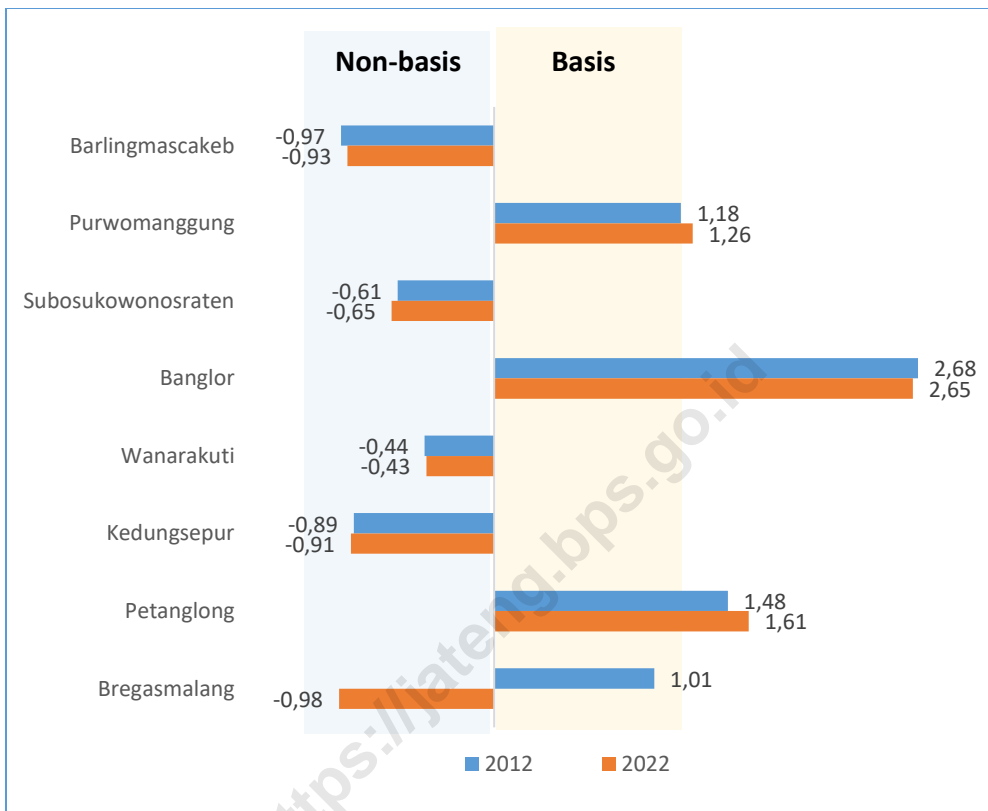
Subkategori kehutanan mencakup kegiatan mencakup penebangan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu dan kayu gelondongan dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan.

Penghitungan LQ dilakukan pada 2 titik yakni 2012 dan 2022 dan dilihat perubahannya. Hasil LQ kehutanan menunjukkan bahwa terdapat empat wilayah pembangunan pada tahun 2012 yang menjadi basis wilayah kehutanan, yaitu Banglor, Petanglong, Purwomanggung, dan Bregasmalang. Pada tahun 2022, wilayah pembangunan Bregasmalang tidak lagi menjadi basis kehutanan, sedangkan tiga wilayah lainnya tetap menjadi basis kehutanan.

Jika dilihat dengan nilai LQ, terdapat satu wilayah pembangunan yang berstatus sangat kuat untuk basis kehutanan, yaitu Banglor yang memiliki nilai $LQ > 2$ untuk tahun 2012 dan 2022. Hal ini selaras dengan Blora yang memang dikenal sebagai penghasil kayu jati terbesar di Jawa Tengah. Hal ini tidak mengejutkan mengingat 49,66 persen wilayah Blora merupakan hutan negara dan hutan rakyat.

Jika dilihat dengan kesesuaian antara nilai LQ dan kontribusi kehutanan, maka bersesuaian. WP Banglor, Purwomanggung, dan Bregasmalang bersesuaian. Tidak hanya kontribusi kehutanan yang tinggi di Jawa Tengah, namun juga menjadi wilayah basis kehutanan di Jawa Tengah. Untuk Petanglong, secara kontribusi terhadap PDRB kehutanan relatif kecil (di bawah 10 persen), namun mampu menjadi kawasan basis kehutanan di Jawa Tengah sejak tahun 2012.

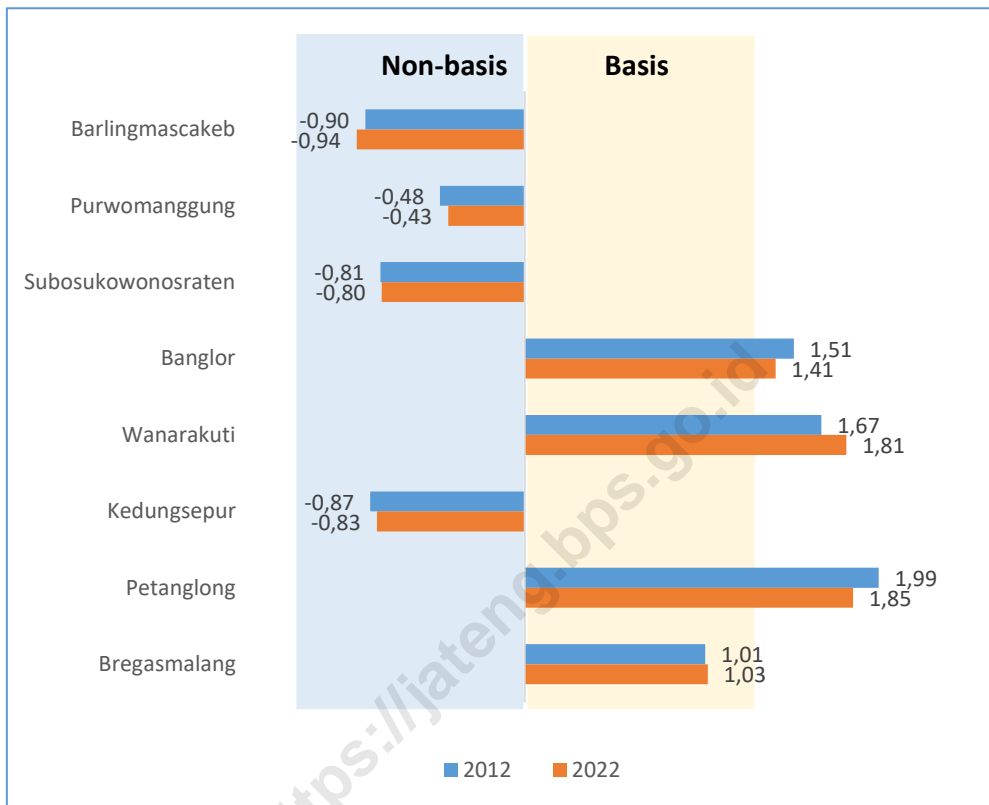
Gambar 4.9 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Subkategori Kehutanan Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022



4.2.7 WILAYAH BASIS PERIKANAN

Subkategori perikanan mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi Jawa Tengah untuk perikanan cukup besar. Total volume perikanan tangkap Jawa Tengah berada di urutan ke-8 secara nasional. Adapun untuk perikanan budidaya, Jawa Tengah berada di urutan ke-5. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Jawa Tengah memiliki tantangan yang berbeda di setiap kabupaten/kota. Di Pesisir utara yang menghadap Laut Jawa, masalah yang dihadapi adalah pencemaran lingkungan, tata ruang laut, dan akses penangkapan ikan. Di pesisir selatan, masalah yang dihadapi adalah infrastruktur penghubung dengan peternakan

Gambar 4.10. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Subkategori Perikanan Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, 2012 dan 2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto masing-masing kabupaten/kota menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah

Penghitungan LQ dilakukan pada 2 titik yakni 2012 dan 2022 dan dilihat perubahannya. Hasil LQ perikanan menunjukkan bahwa terdapat empat wilayah pembangunan pada tahun 2012 yang menjadi basis wilayah perikanan, yaitu Petanglong, Wanarakuti, Banglor, dan Bregasmalang. Pada tahun 2022, keempat wilayah pembangunan tersebut tetap menjadi basis perikanan dan tidak terjadi perubahan yang besar dari nilai LQ setiap wilayah pembangunan. Walaupun begitu, wilayah pembangunan Petanglong tetap menjadi basis terkuat dengan basis terkuat terdapat di Kota Pekalongan.

Pelabuhan Perikanan Nasional Pekalongan pernah meraih kejayaan pada era 1990 hingga 2002 sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia. Kota Pekalongan sendiri merupakan satu dari 12 wilayah yang menjadi sasaran proyek minapolitan oleh pemerintah, sehingga tidak hanya

Ketimpangan pendapatan dapat dilihat secara makro melalui PDRB dan secara mikro melalui pendapatan rumah tangga

perikanan tangkap yang menjadi andalan, namun juga perikanan budidaya sangat menjanjikan.

Jika dilihat dengan kesesuaian antara nilai LQ dan kontribusi perikanan, maka hanya WP Wanarakuti yang bersesuaian. WP Petanglong sebagai kawasan basis paling kuat bahkan hanya berkontribusi sebesar 9,33 persen. WP basis perikanan lainnya juga memiliki kontribusi yang relatif kecil (di bawah 10 persen) namun mampu menjadi kawasan basis kehutanan di Jawa Tengah sejak tahun 2011.

4.3. KETIMPANGAN PENDAPATAN PERTANIAN

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian mempunyai peranan yang penting karena berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Tak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dan pertanian erat kaitannya. Pertumbuhan sektor pertanian berkaitan dengan tingkat kemiskinan dikarenakan jumlah rumah tangga miskin sebagian besar berasal dari karakteristik rumah tangga dengan sumber penghasilan utama rumah tangga sektor pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian juga akan memberikan kontribusi besar terhadap penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan usahatani, dan dapat mendorong kegiatan sektor non-pertanian di pedesaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan dapat didekati salah satunya dengan pemerataan pendapatan pertanian.

Pendapatan sektor pertanian dapat didekati baik secara makro maupun mikro. Untuk melihat secara makro, pendapatan didekati dengan PDRB dari sisi produksi untuk lapangan usaha pertanian. Sementara untuk melihat dari sisi mikro digunakan data pendapatan rumah tangga pertanian dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Pertanian Antar Sensus.

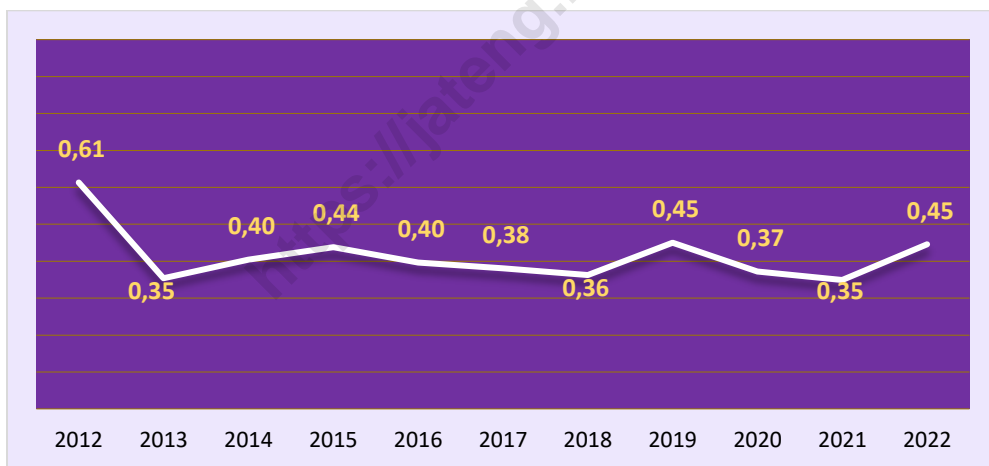
Analisis secara makro menggunakan data PDRB akan disajikan dalam Indeks Wiliamson. Sementara analisis secara mikro menggunakan data pendapatan rumah tangga pertanian akan disajikan dalam Kurva Lorentz dan Koefisien Gini

4.3.1. KETIMPANGAN PENDAPATAN MAKRO

Ketimpangan pendapatan pertanian secara makro sejak 2013-2022 masuk kategori ketimpangan sedang ($0,35 \leq IW \leq 0,5$)

Perbedaan nilai PDRB Pertanian perkapita yang sangat mencolok akan menimbulkan perbedaan kesejahteraan masyarakat dan tidak meratanya distribusi pendapatan antarwilayah. Dampak terbesar dari perbedaan proses pembangunan dan pada kondisi demografi wilayah berujung pada timbulnya ketimpangan. Sjafrizal (1997) mengungkapkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah dipicu oleh perbedaan potensi daerah yang sangat besar, kondisi demografis dan ketenagakerjaan serta perbedaan kondisi sosial budaya antarwilayah.

Gambar 4.11. Indeks Williamson PDRB Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2012-2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto masing-masing kabupaten/kota menurut Lapangan Usaha, 2012-2022, diolah

Kondisi ketimpangan pendapatan sektor pertanian antar kabupaten/kota di Jawa Tengah ditampilkan melalui Indeks Williamson.

Nilai Indeks Williamson berkisar antara nol dan satu. Bila indeks mendekati nol artinya pendapatan sangat merata, sedangkan jika semakin jauh dari nol atau mendekati satu artinya sangat timpang. Pada Gambar sebelumnya, terlihat bahwa nilai Indeks Williamson pertanian turun dari 0,61 pada tahun 2012 menjadi 0,35 pada tahun 2013 dan terus bertahan pada

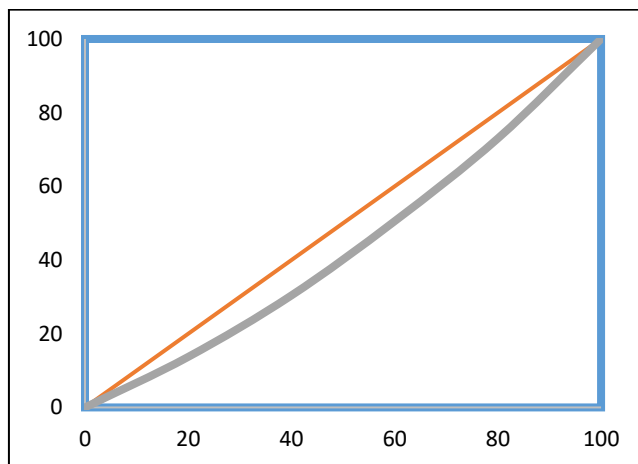
angka kurang dari 0,5 hingga tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan pertanian antarwilayah di Jawa Tengah sudah membaik jika dibandingkan tahun 2012, tapi belum mencapai ketimpangan rendah.

Pada rentang tahun 2013 hingga 2022, nilai IW pada tahun 2019 menjadi yang tertinggi, yaitu 0,4497. Nilai IW pada tahun 2022 juga terhitung tinggi, yaitu 0,4458. Dari pendekatan mikro, ketimpangan hanya dapat dilihat pada tahun 2013 dari variabel rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian. Indeks Williamson yang dihasilkan pada tahun tersebut dari pendekatan mikro adalah sebesar 0,2044 yang mana masuk sebagai ketimpangan rendah. Selain dengan indeks Williamson, hal menarik yang bisa dilihat dari ketimpangan dengan pendekatan rumah tangga adalah Kurva Lorentz dan Koefisien Gini.

4.3.2. KETIMPANGAN PENDAPATAN MIKRO

Kurva Lorentz memberikan visualisasi mengenai ketimpangan pendapatan rumah tangga pertanian. Variabel pendapatan yang digunakan merupakan penjumlahan dari pendapatan usaha pertanian dan upah sebagai buruh tani per kabupaten/kota. Gambaran yang didapat adalah sebagai berikut.

Gambar 4.12. Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian



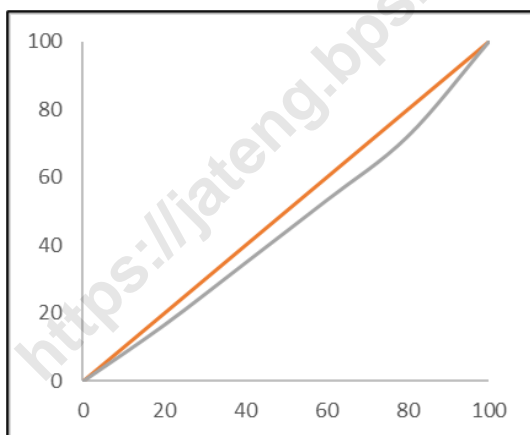
Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2013, diolah

Jika diperhatikan sepintas, terlihat bahwa jarak antara kurva Lorentz dan garis distribusi merata tidak begitu besar. Namun untuk memastikannya, diperlukan Koefisien Gini. Koefisien Gini yang didapat adalah sebesar 0,1292, yang mana masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Kontradiksi yang didapatkan antara pendekatan makro dan mikro menarik untuk diperhatikan. Dalam level mikro atau pendekatan rumah tangga, pendapatan petani dinilai hampir sama antarwilayah. Ketimpangan yang terjadi secara makro menjadi sinyal bahwa PDRB Pertanian tidak seutuhnya dapat dinikmati oleh rumah tangga pertanian,

WP BARLINGMASCAKEB

Gambar 4.13. Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Barlingmascakeb

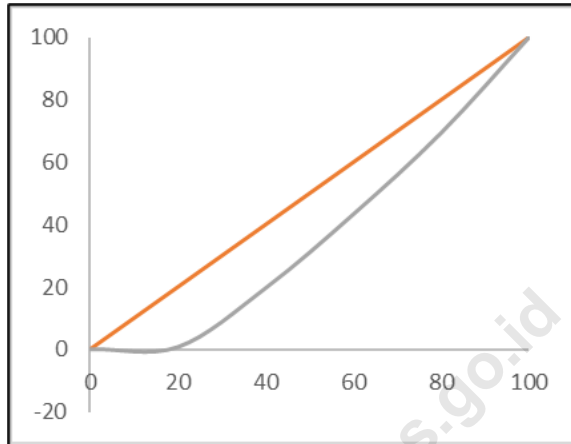


Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2013, diolah

Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa jarak antara kurva Lorentz dan garis distribusi merata cukup kecil. Namun untuk memastikannya, diperlukan Koefisien Gini. Koefisien Gini yang diperoleh adalah sebesar 0,0928. Artinya Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen memiliki ketimpangan pendapatan pertanian yang rendah.

WP PURWOMANGGUNG

Gambar 4.14. Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Purwomanggung

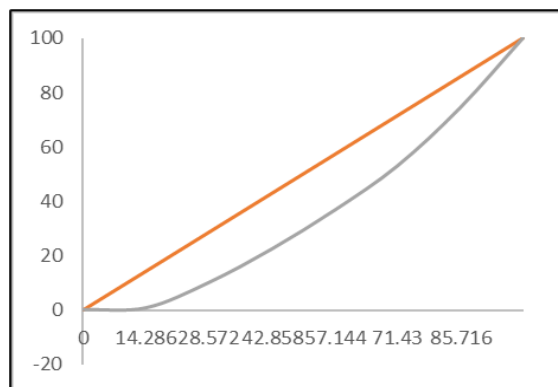


Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2013, diolah

Jika dilihat sepintas, jarak antara kurva Lorentz dan garis distribusi merata cukup besar. Namun, Koefisien Gini yang diperoleh adalah sebesar 0,2677. Artinya ketimpangan pendapatan antar penduduk pada sektor pertanian di Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang tergolong rendah.

WP SUBOSUKAWONSRATEN

Gambar 4.15. Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Subosukawonosraten

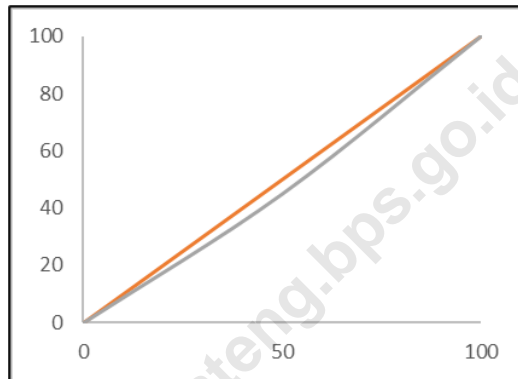


Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2013, diolah

Gambar diatas menunjukkan jarak yang cukup besar antara kurva Lorentz dan garis distribusi merata. Jika dilihat dari Koefisien Gini, diperoleh angka sebesar 0,2948. Artinya ketimpangan pendapatan pada sektor pertanian di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten tergolong rendah.

WP BANGLOR

Gambar 4.16. Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Banglor



Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2013, diolah

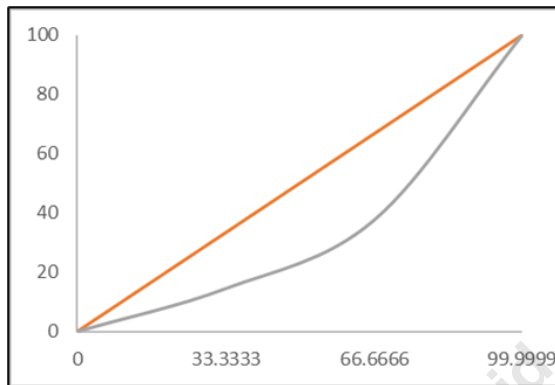
Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa jarak antara kurva Lorentz dan garis distribusi merata tidak begitu besar. Koefisien Gini yang diperoleh adalah sebesar 0,0503. Artinya Kabupaten Blora dan Rembang memiliki ketimpangan pendapatan pertanian yang rendah.

WP WANARAKUTI

Jika dilihat sepintas, jarak antara kurva Lorentz dan garis distribusi merata cukup besar. Namun, Koefisien Gini yang diperoleh adalah sebesar 0,3201.

Artinya ketimpangan pendapatan antar penduduk pada sektor pertanian di Kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara tergolong rendah.

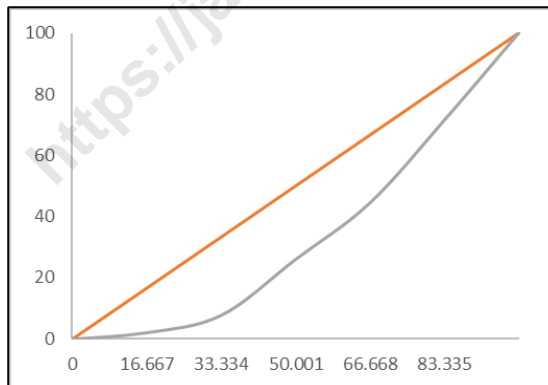
Gambar 4.17. Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Wanarakuti



Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2013, diolah

WP KEDUNGSEPUR

Gambar 4.18. Kurva Lorentz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Kedungsepur



Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2013, diolah

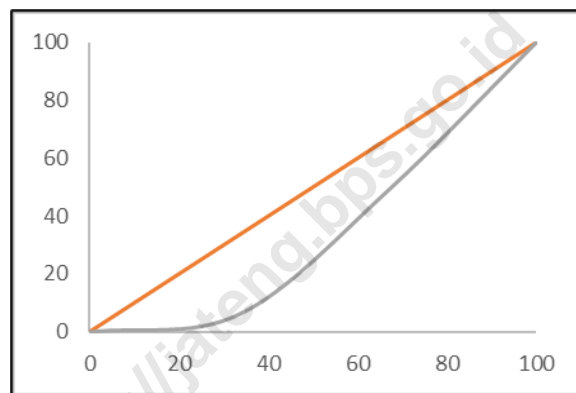
Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa jarak antara kurva Lorentz dan garis distribusi merata cukup besar. Koefisien Gini yang diperoleh adalah sebesar 0,3269. Artinya Kabupaten Kendal, Demak, Semarang, Grobogan, Kota Salatiga, dan Kota Semarang memiliki ketimpangan pendapatan pertanian antar penduduk yang rendah.

WP PETANGLONG

Gambar diatas menunjukkan jarak yang cukup besar antara kurva Lorenz dan garis distribusi merata.

Jika dilihat dari Koefisien Gini, diperoleh angka sebesar 0,3017. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk pada sektor pertanian di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan tergolong ketimpangan rendah.

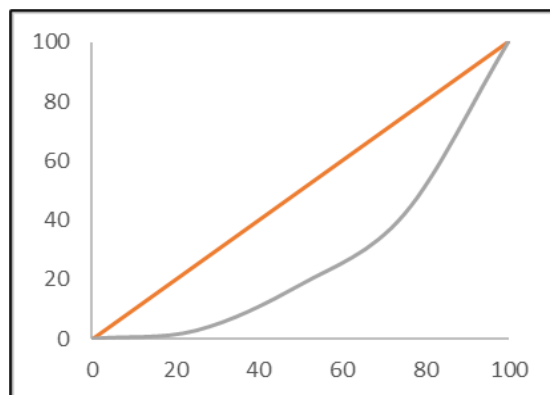
Gambar 4.19. Kurva Lorenz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Petanglong



Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2013, diolah

WP BREGASMALANG

Gambar 4.20. Kurva Lorenz Pendapatan Pertanian Wilayah Pembangunan Bergasmalang



Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2013, diolah

Ketimpangan penguasaan lahan dapat diminimalisir dengan *land reform*.

Jika dilihat dari Gambar, jarak antara kurva Lorentz dan garis distribusi merata cukup besar. Nilai Koefisien Gini yang diperoleh adalah sebesar 0,4361. Angka ini mengandung arti bahwa ketimpangan pendapatannya antar penduduk pada kategori pertanian di Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, dan kota Tegal masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

4.4. KETIMPANGAN PENGUSAHAAN LAHAN PERTANIAN

Persoalan struktural lahan pertanian berkaitan dengan alih fungsi lahan dan ketimpangan penguasaan lahan.

Salah satu faktor yang menghambat kinerja sektor pertanian adalah persoalan struktural menyangkut lahan pertanian. Lahan merupakan faktor produksi utama pada sektor pertanian yang penguasaan dan pengelolaannya dapat melahirkan berbagai konsekuensi mendasar secara ekologis, sosial-ekonomi, dan politik. Setidaknya, ada empat kategori persoalan struktural di sektor pertanian yang berpusat pada faktor lahan ini. Dua persoalan pertama berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian, baik berupa perubahan pemanfaatan lahan itu dari fungsi produksi komoditas pangan ke non-pangan, atau berupa perubahan penggunaan lahan itu dari fungsi pertanian ke non-pertanian. Lalu, dua persoalan struktural terakhir berkaitan dengan ketimpangan penguasaan lahan, baik ketimpangan itu berdimensi horizontal di antara sesama petani atau berdimensi vertikal yang berlangsung antara petani dengan perusahaan skala besar (Shohibuddin, 2019).

Mengenai ketimpangan penguasaan lahan di antara sesama petani sendiri, hal ini terjadi ketika sebagian kecil petani menguasai lahan yang sangat luas, sementara sebagian besar petani kekurangan akses atas lahan pertanian. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan alokasi tanah dari pemerintah yang sering lebih memihak kepentingan korporasi besar. Jadi, alih-alih diberikan kepada petani miskin dan buruh tani yang amat membutuhkan lahan garapan, banyak tanah justru dialokasikan untuk korporasi di bidang perkebunan, pertambangan, industri, real estate, dan sebagainya.

4.4.1 LUAS WILAYAH DAN LAHAN PERTANIAN

Ketimpangan penguasaan lahan dapat diminimalisir dengan reforma agraria/*land reform*, upaya pembaruan struktur penguasaan lahan pertanian yang timpang agar tercipta sebaran penguasaan yang lebih adil. Menurut Wiradi (2009a), keberhasilan *land reform* ditentukan antara lain oleh ketersediaan data yang lengkap dan akurat. Data yang diperlukan antara lain adalah profil rumah tangga yang terlibat usahatani, penggunaan lahan pertanian, luas dan lokasi lahan pertanian yang dikuasai, serta dasar penguasaan lahannya. Tanpa data semacam ini, perombakan penguasaan lahan tidak akan dapat dilaksanakan secara baik, bahkan dapat menimbulkan dampak yang merugikan.

Kebutuhan data ini terpenuhi dari kegiatan Sensus Pertanian Informasi yang digali melalui sensus ini juga mencakup profil rumah tangga petani, kegiatan usahatani, serta penggunaan dan penguasaan lahan pertanian. Sayangnya, data sensus ini belum banyak dimanfaatkan untuk mendukung program *land reform*, misalnya dianalisis untuk membantu identifikasi potensi tanah objek *land reform* dan calon penerima manfaatnya.

Salah satu penyebabnya adalah karena konsep “penguasaan lahan” yang digunakan dalam Sensus Pertanian merujuk pada pengertian penguasaan efektif, yakni penguasaan garapan (operasional) atas lahan pertanian oleh rumah tangga petani tanpa yang bersangkutan harus menjadi pihak yang menguasai lahan ini secara formal.

Dalam praktik *land reform* selama ini, ketimpangan penguasaan formal atau kepemilikan legal inilah yang lebih sering dijadikan sasaran, sementara ketimpangan penguasaan efektif cenderung diabaikan. Padahal, sebenarnya, konsepsi dasar *land reform* juga harus menyasar bentuk-bentuk relasi lain.

Luas lahan pertanian yang dikuasai menunjukkan tren peningkatan dari 2003 ke 2013, terutama di wilayah perkotaan, namun sedikit menurun di tahun 2018. Persentase tertinggi luas lahan pertanian terdapat di Kabupaten Demak yang selama tiga tahun selalu konsisten di atas 50 persen, disusul Pati dan Temanggung.

Tabel 4.2. Luas Wilayah, Luas Lahan Pertanian, dan Persentase Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Wilayah Kabupaten/Kota (m²)

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Lahan Pertanian (Hektar)			Persentase Luas Lahan Pertanian dibanding Luas Wilayah (persen)		
		2003	2013	2018	2003	2013	2018
Kab Cilacap	2 124,47	70 628,26	84 550,08	76 096,05	33,25	39,80	35,82
Kab Banyumas	1 335,30	42 590,98	55 442,15	50 160,11	31,90	41,52	37,56
Kab Purbalingga	677,55	33 777,23	38 548,34	38 789,06	49,85	56,89	57,25
Kab Banjarnegara	1 023,73	58 603,28	60 584,53	51 580,95	57,24	59,18	50,39
Kab Kebumen	1 211,74	49 893,21	56 242,07	52 506,89	41,17	46,41	43,33
Kab Purworejo	1 091,49	47 450,20	47 115,79	41 033,78	43,47	43,17	37,59
Kab Wonosobo	981,41	45 933,50	51 986,70	47 035,10	46,80	52,97	47,93
Kab Magelang	1 102,93	43 733,08	51 777,45	45 513,07	39,65	46,95	41,27
Kab Boyolali	1 008,45	40 562,97	47 520,12	42 692,00	40,22	47,12	42,33
Kab Klaten	658,22	24 351,69	30 807,07	29 627,49	37,00	46,80	45,01
Kab Sukoharjo	489,12	11 454,12	19 690,90	16 716,00	23,42	40,26	34,18
Kab Wonogiri	1 793,67	90 929,65	88 226,53	72 704,80	50,69	49,19	40,53
Kab Karanganyar	775,44	27 548,19	31 229,61	29 304,93	35,53	40,27	37,79
Kab Sragen	941,54	40 287,73	47 096,32	41 691,19	42,79	50,02	44,28
Kab Grobogan	2 013,86	72 519,07	84 369,97	81 571,10	36,01	41,89	40,50
Kab Blora	1 804,59	62 203,65	71 107,67	68 679,33	34,47	39,40	38,06
Kab Rembang	887,13	42 983,72	50 428,08	46 081,80	48,45	56,84	51,94
Kab Pati	1 489,19	67 153,04	88 882,95	98 622,21	45,09	59,69	66,23
Kab Kudus	425,15	11 579,26	20 392,91	18 636,89	27,24	47,97	43,84
Kab Jepara	1 059,25	28 415,30	36 392,83	34 769,21	26,83	34,36	32,82
Kab Demak	900,12	45 117,49	58 135,30	49 502,31	50,12	64,59	55,00
Kab Semarang	950,21	31 545,06	41 769,10	36 839,07	33,20	43,96	38,77
Kab Temanggung	837,71	41 824,34	51 694,67	53 996,50	49,93	61,71	64,46
Kab Kendal	1 118,13	31 091,70	44 641,01	44 349,43	27,81	39,92	39,66
Kab Batang	788,65	24 127,14	32 736,54	30 019,72	30,59	41,51	38,06
Kab Pekalongan	837,00	21 873,15	30 214,54	33 378,04	26,13	36,10	39,88
Kab Pemasang	1 118,03	30 737,08	49 456,34	44 258,26	27,49	44,24	39,59
Kab Tegal	876,10	20 419,71	42 854,99	36 066,31	23,31	48,92	41,17
Kab Brebes	1 902,37	42 380,23	73 610,97	61 341,46	22,28	38,69	32,24
Kota Magelang	16,06	25,18	168,37	186,07	1,57	10,48	11,59
Kota Surakarta	4601	1,48	93,16	59,03	0,03	2,02	1,28
Kota Salatiga	57,36	536,34	1 234,37	1 293,20	9,35	21,52	22,55
Kota Semarang	373,78	797,60	5 022,17	3 923,30	2,13	13,44	10,50
Kota Pekalongan	45,25	67,85	904,55	914,96	1,50	19,99	20,22
Kota Tegal	39,68	231,59	788,83	1 025,13	5,84	19,88	25,83

Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2003, Sensus Pertanian 2013, dan SUTAS 2018

4.4.2 PENGUASAAN LAHAN OLEH RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN

Salah satu kunci dalam tinjauan transformasi agraria adalah seberapa besar Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di suatu wilayah yang bekerja di sektor pertanian dan berapa luas proporsi lahan yang mereka kuasai.

Kondisi ideal untuk mewujudkan transformasi agraria yang lebih baik adalah ketika jumlah tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun seiring peluang kerja di sektor non-pertanian yang meningkat, dengan demikian RTUP yang bertahan akan menguasai lahan pertanian lebih luas dan dapat menjalankan usaha tani lebih produktif. Kondisi ideal menurut UU No. 56 PRP Tahun 1960 menegaskan bahwa kondisi ideal dapat dicapai apabila penguasaan lahan pertanian per RTUP sekurangnya seluas 2 ha.

Dari Gambar 4.12 dan Gambar 4.13, terlihat bahwa rata-rata penguasaan lahan per RTUP masih sangat rendah, yakni di bawah 2.000 m² per RTUP. Jumlah lahan sawah yang dikuasai oleh RTUP di Jawa Tengah selalu lebih banyak dibandingkan lahan non-sawah menunjukkan bahwa tumpuan pertanian Jawa Tengah masih bertumpu pada pertanian tanaman pangan, khususnya padi.

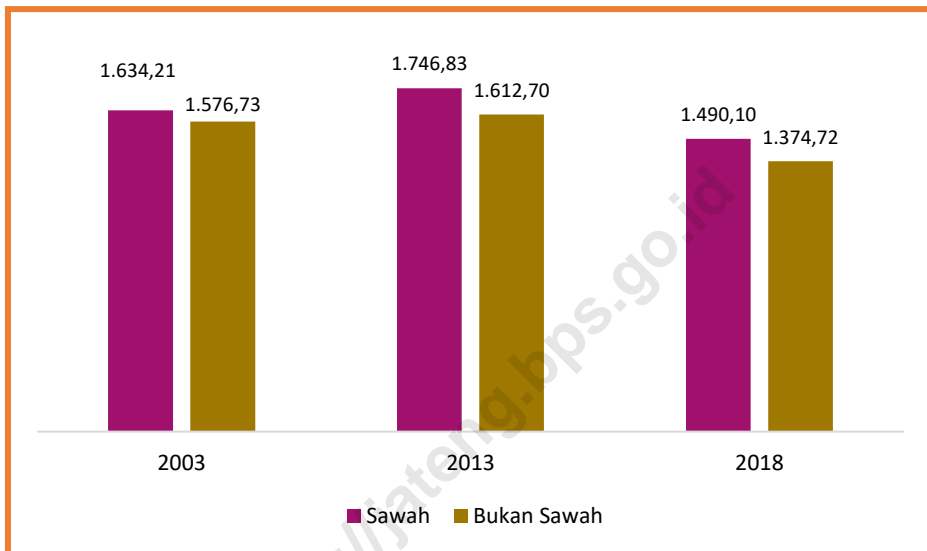
Jika diperhatikan perwilayah, maka rata-rata penguasaan lahan pertanian terluas per RTUP dimiliki oleh Kabupaten Pati yang mencapai 2.559 m² di tahun 2018. Tren penguasaan lahannya pun menunjukkan peningkatan dibandingkan 2003 dan 2013. Selain Pati, wilayah dengan penguasaan lahan yang cukup besar adalah Kabupaten Rembang dan Temanggung. Anomali terlihat di Kota Pekalongan dan Kota Tegal dimana luas lahan yang dikuasai pada tahun 2013 meningkat tajam hingga tiga kali lipatnya dari posisi tahun 2003 namun menurun kembali di tahun 2018. Perlu digali lebih lanjut hal yang mampu menjelaskan fenomena tersebut.

Secara umum tren penguasaan lahan menunjukkan penurunan dari tahun 2003 ke 2018. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh alih fungsi lahan dan meningkatnya jumlah RTUP sehingga pembagiannya menjadi lebih banyak dalam menghitung rata-rata luas lahan. Namun jika melihat data jumlah RTUP yang menunjukkan tren penurunan, maka penyebab menurunnya luas lahan yang dikuasai adalah alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi non-pertanian.

Berdasarkan kepemilikan lahan, petani dapat digolongkan menjadi tiga kategori. Petani dengan lahan luas adalah petani kaya, petani dengan lahan

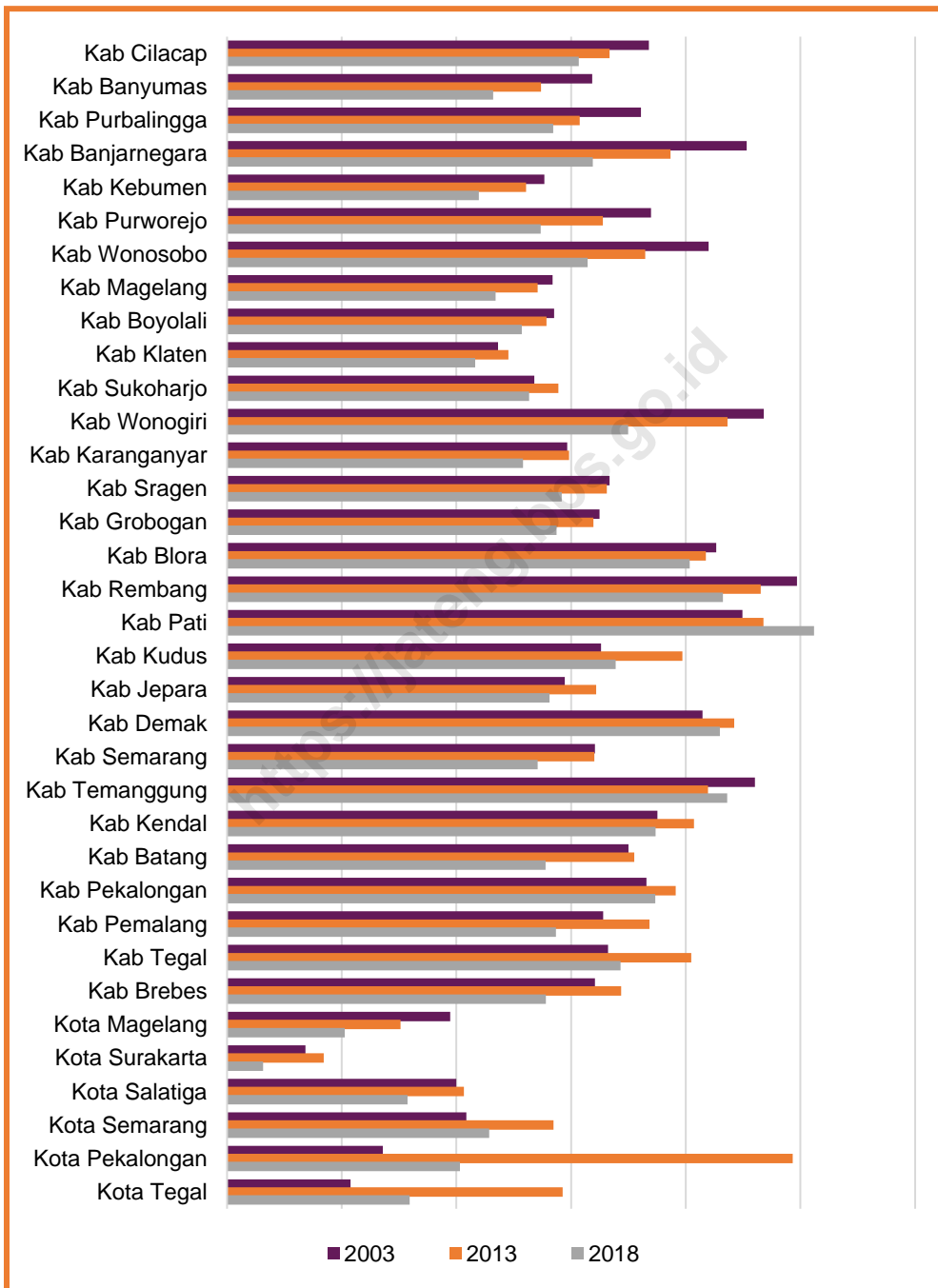
menengah, dan petani dengan lahan sempit. Setiap kategori petani memiliki strategi berbeda dalam pemilihan jenis tanaman, tenaga pengelolaan lahan, modal pertanian hingga mempertahankan ketahanan sosial (resiliensi) bagi tiap-tiap keluarga.

Gambar 4.21. Rata-rata Luas Lahan Sawah dan Non-Sawah yang Dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian di Jawa Tengah (m²)



Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2003, Sensus Pertanian 2013, dan SUTAS 2018

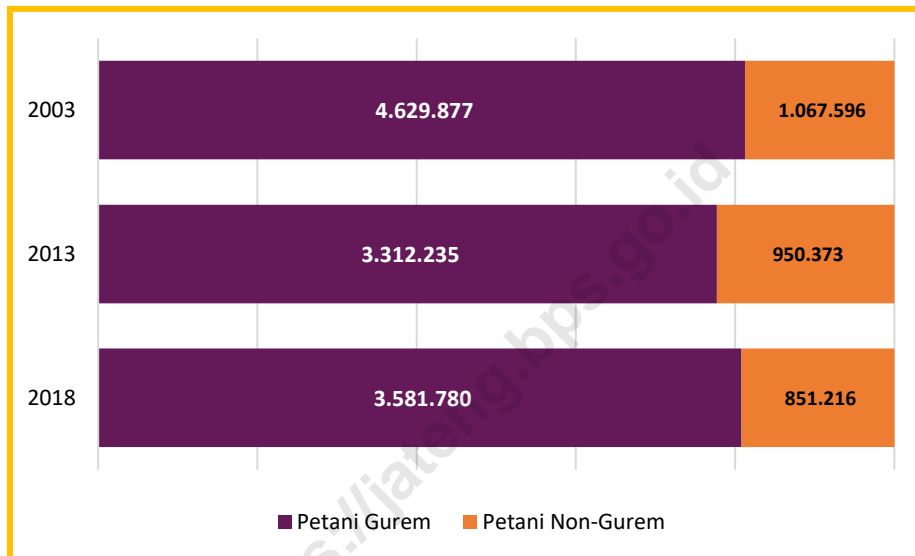
Gambar 4.22. Rata-rata Luas Lahan yang dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (m²)



4.4.3. PETANI GUREM VS NON-GUREM

Dalam dunia pertanian, dikenal istilah petani gurem, yakni petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun menyewa. Perkembangan jumlah petani gurem di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 4.23. Jumlah RTUP Gurem dan Non-Gurem di Jawa Tengah

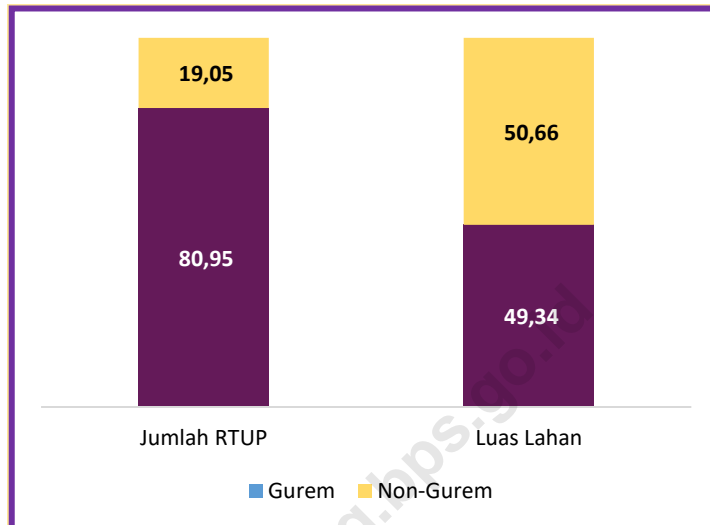


Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2003, Sensus Pertanian 2013, dan SUTAS 2018

Pada tahun 2003, jumlah RTUP gurem di Jawa Tengah adalah 4,6 juta rumah tangga atau sekitar 81,3 persen dari total RTUP di Jawa Tengah. Satu decade kemudian, angka ini mengalami sedikit penurunan dengan jumlah RTUP gurem 3,3 juta atau sekitar 77,7 persen dari total RTUP. Sedangkan statistik terakhir, kondisi di tahun 2018, menunjukkan sedikit peningkatan lagi yakni sebanyak 3,6 juta RTUP gurem atau 80,8 persen dari total RTUP di Jawa Tengah.

Tingginya porsi petani gurem menunjukkan rendahnya kesejahteraan pertanian di Jawa Tengah. Padahal tidak seluruh RTUP gurem memiliki lahannya sendiri. Namun sayangnya, informasi mengenai porsi RTUP gurem yang memiliki lahan sendiri dan menyewa lahan tidak bisa dirinci dari hasil Sensus Pertanian. Hal selanjutnya yang menarik untuk dilihat adalah besarnya penguasaan lahan RTUP gurem terhadap total luasan lahan pertanian di Jawa Tengah.

Gambar 4.24. Proporsi RTUP dan Luas Lahan yang dikuasai (persen), Hasil SUTAS 2018



Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2003, Sensus Pertanian 2013, dan SUTAS 2018

Gambar di atas menyajikan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018. Sebanyak 80,95 persen RTUP yang berstatus gurem menguasai separuh lahan pertanian, sedangkan separuh lainnya dikuasai oleh 19,05 persen RTUP dengan status penguasaan lahan lebih besar. Kecilnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani di Indonesia mengakibatkan rendahnya pendapatan per rumah tangga petani, baik bagi petani pemilik lahan sebagai operator aktif, petani pemilik lahan yang menyewakan lahan, maupun petani penggarap (Sumarno dan Kartasmita 2009). Kecilnya skala usaha tani juga berakibat pada rendahnya produktivitas tenaga kerja petani dan efisiensi produksi, walaupun tingkat produktivitas padi sawah di Jawa termasuk tertinggi (Sumarno et al., 2010).

Sebanyak 80,95 persen RTUP yang berstatus gurem menguasai separuh lahan pertanian, sedangkan separuh lainnya dikuasai oleh 19,05 persen RTUP dengan status penguasaan lahan lebih besar.

Jika dilihat per kabupaten kota, proporsi dari petani gurem terhadap total RUTP memiliki porsi yang sungguh fantastis yakni di atas 70 persen bahkan sejak 2013. Beberapa wilayah bahkan memiliki porsi petani gurem mendekati 100 persen, terutama di wilayah perkotaan, di mana

luasannya lahan pertanian memang sangat terbatas. Data terinci disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Proporsi Petani Gurem terhadap Total RTUP per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Wilayah	2003	2013	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab Cilacap	80,80	78,32	81,69
Kab Banyumas	84,62	83,98	86,92
Kab Purbalingga	82,35	80,75	82,99
Kab Banjarnegara	72,04	73,82	79,68
Kab Kebumen	85,98	86,12	89,35
Kab Purworejo	78,64	80,02	83,63
Kab Wonosobo	73,42	76,64	80,77
Kab Magelang	85,05	85,32	88,02
Kab Boyolali	84,05	83,06	85,31
Kab Klaten	91,82	86,86	87,64
Kab Sukoharjo	86,78	80,28	82,83
Kab Wonogiri	64,92	67,37	75,61
Kab Karanganyar	83,58	81,82	84,09
Kab Sragen	81,96	79,08	82,18
Kab Grobogan	81,34	79,28	82,28
Kab Blora	69,46	69,81	71,16
Kab Rembang	65,62	63,71	65,17
Kab Pati	77,38	71,25	68,04
Kab Kudus	88,56	77,70	83,63
Kab Jepara	88,19	80,55	82,43
Kab Demak	78,26	69,84	72,48
Kab Semarang	82,14	78,99	83,37
Kab Temanggung	69,17	69,93	67,06
Kab Kendal	82,28	73,64	75,90
Kab Batang	82,60	78,73	83,99
Kab Pekalongan	84,92	74,22	74,55
Kab Pemalang	85,73	77,00	82,32
Kab Tegal	86,69	73,08	78,28
Kab Brebes	86,80	80,77	84,48
Kota Magelang	91,99	90,89	94,50
Kota Surakarta	97,25	94,81	98,77
Kota Salatiga	93,24	89,03	92,61
Kota Semarang	90,65	82,14	85,84
Kota Pekalongan	95,68	68,04	87,03
Kota Tegal	96,93	80,83	90,70

4.4.4 KETIMPANGAN DARI INDEKS WILLIAMSON

Hal selanjutnya yang menarik untuk dilihat adalah seberapa timpang penguasaan lahan antarwilayah di Jawa Tengah yang dilihat melalui Indeks Williamson.

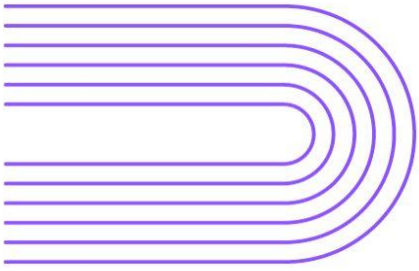
Tabel 4.4 Indeks Williamson Ketimpangan Penguasaan Lahan

Nilai	2003	2013	2018
Indeks Williamson	0,52	0,56	0,55

Sumber: Hasil Sensus Pertanian 2003, Sensus Pertanian 2013, dan SUTAS 2018

Hasil penghitungan menunjukkan angka IW lebih besar dari 0,5 untuk semua tahun pengamatan yang berarti bahwa penguasaan lahan oleh RTUP antarwilayah di Jawa Tengah memiliki ketimpangan yang besar. Ketimpangan yang besar dalam hal penguasaan lahan antarwilayah sebenarnya bukan merupakan hal yang sangat dipermasalahkan mengingat kapasitas lahan setiap wilayah tentu berbeda dalam menyokong pertanian, misalnya RTUP wilayah perkotaan tentunya tidak seelusage RTUP wilayah perdesaan karena memang terbatasnya lahan pertanian di perkotaan.

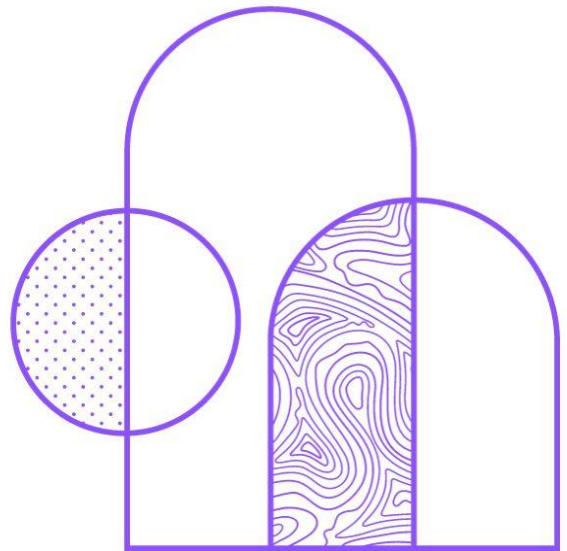
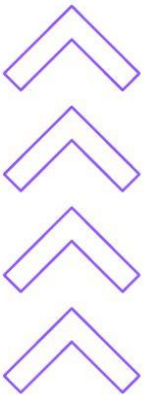
Hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana menggenjot produktivitas pertanian dan memaksimalkan potensi tiap wilayah sesuai dengan spesialisasi lapangan usahanya masing-masing.



BAB V.

KESIMPULAN

<https://jateng.bps.go.id>



<https://jateng.bps.go.id>

BAB V

KESIMPULAN

Pertanian merupakan lapangan usaha unggulan di Jawa Tengah yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada perekonomian setelah industri pengolahan. Jawa Tengah juga merupakan salah satu lumbung padi nasional karena memiliki produksi tanaman pangan yang besar. Potensi pertanian Jawa Tengah tidak hanya terbatas pada tanaman pangan, namun juga pada subsektor pertanian lainnya seperti hortikultura dan perikanan.

Berdasarkan Tipologi Klassen, terdapat sembilan wilayah di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori wilayah pertanian maju dan tumbuh pesat, di antaranya Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Boyolali, Pati, Temanggung, Kendal, Pemalang, dan Brebes. Kesemua wilayah yang disebutkan memiliki rata-rata pertumbuhan lapangan usaha pertanian di atas 2,26 persen dan memiliki rata-rata kontribusi pertanian lebih besar dari 15 persen pada periode tahun 2012-2022.

Guna mengetahui sektor basis/non-basis, pada level Jawa Tengah, pertanian merupakan salah satu lapangan usaha yang menjadi sektor basis. Untuk basis pertanian terkuat di Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes, Wonosobo, Wonogiri, Banjarnegara, dan Grobogan.

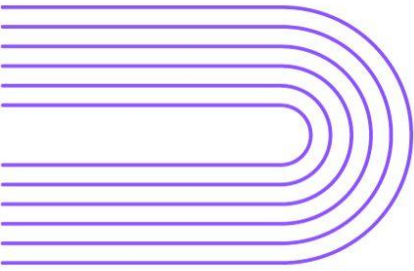
Masing-masing wilayah di kabupaten/kota memiliki subsektor pertanian basisnya sendiri. Basis terkuat untuk subsektor tanaman pangan adalah Kabupaten Grobogan. Basis terkuat untuk subsektor hortikultura adalah Kabupaten Brebes. Untuk perkebunan, basis yang sangat kuat di Jawa Tengah berada di Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Kabupaten Pekalongan. Untuk basis kehutanan sangat kuat terdapat di Kabupaten Blora, sedangkan basis perikanan terkuat adalah Kota Pekalongan.

Perbedaan basis di tiap wilayah tentunya berdampak pada ketimpangan pendapatan rumah tangga usaha pertanian. Ketimpangan pendapatan didekati melalui dua sisi, yakni sisi makro menggunakan data PDRB pertanian dan sisi mikro menggunakan data pendapatan rumah tangga usaha pertanian. Hasil yang didapat dari kedua pendekatan ini cukup berbeda. Dari sisi makro, terlihat ketimpangan yang besar antar wilayah di Jawa Tengah. Namun dari sisi mikro tidak ditemukan indikasi yang sama. Ketimpangan pendapatan rumah tangga usaha pertanian cenderung kecil.

Hal ini menjadi sinyal bahwa nilai PDRB pertanian tidak sepenuhnya dinikmati oleh rumah tangga usaha pertanian.

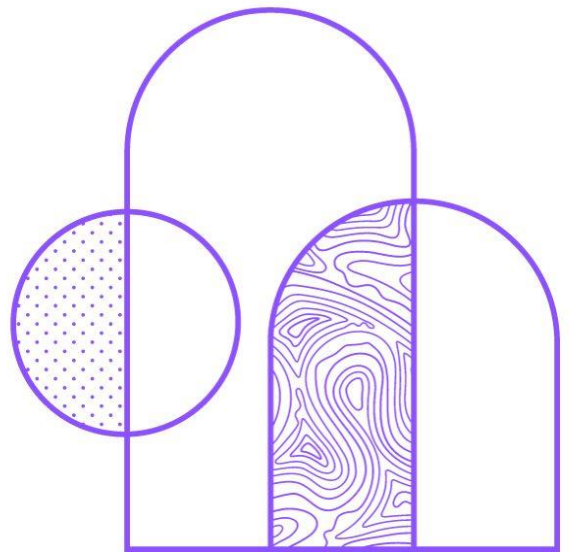
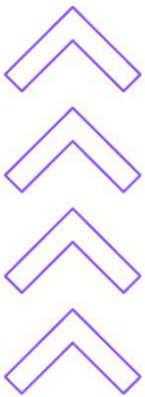
Dari sisi penguasaan lahan petani, dapat dibedakan menjadi petani gurem dengan penguasaan < 0,5 ha dan petani dengan penguasaan lahan lebih besar atau sama dengan 0,5 ha. Proporsi petani gurem di Jawa Tengah sangat tinggi, yakni 80,95 persen pada tahun 2018 dibanding yang non gurem. Dalam hal penguasaan lahan, petani gurem hanya menguasai 49,34 persen lahan pertanian dan sisanya dikuasai oleh rumah tangga pertanian non gurem.

Penguasaan lahan antar wilayah juga memiliki ketimpangan yang besar. Hal ini terlihat dari Indeks Williamson yang nilainya > 0,5. Masalah ketimpangan penguasaan lahan terjadi karena perbedaan kapasitas daerah dalam menyediakan lahan pertanian. Kawasan pertanian di wilayah perkotaan tentunya lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah non-perkotaan. Oleh karena itu, dalam hal meningkatkan ketahanan pangan, yang perlu diperhatikan adalah peningkatan produktivitasnya.



LAMPIRAN

<https://jateng.bps.go.id>



<https://jateng.bps.go.id>

Lampiran 1. Nilai Location Quotient Tiap Subsektor Pertanian Berdasarkan Wilayah, 2012

Wilayah	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Jasa Pertanian	Kehutanan	Perikanan
Kab Cilacap	1.18	0.28	2.11	0.71	1.00	1.79	1.34
Kab Banyumas	0.93	0.40	1.97	1.63	1.03	0.73	0.85
Kab Purbalingga	0.64	1.18	1.74	1.29	1.04	0.60	0.87
Kab Banjarnegara	0.65	2.08	0.79	0.40	1.04	0.58	0.97
Kab Kebumen	1.16	1.11	1.36	0.68	0.75	0.62	0.23
Kab Purworejo	1.13	0.86	-0.98	0.74	1.07	1.21	0.52
Kab Wonosobo	0.54	2.21	0.41	0.61	0.81	1.62	0.55
Kab Magelang	0.83	1.50	0.56	1.08	0.99	1.16	0.41
Kab Boyolali	0.88	0.77	0.45	1.97	1.02	0.78	1.05
Kab Klaten	1.20	0.47	0.66	1.38	0.88	1.08	1.41
Kab Sukoharjo	1.41	0.23	0.32	2.03	1.12	0.16	0.43
Kab Wonogiri	1.47	0.38	0.98	1.09	0.51	0.87	0.63
Kab Karanganyar	0.97	0.89	0.86	1.82	1.12	0.19	0.15
Kab Sragen	1.48	0.49	0.73	0.94	1.01	0.29	1.13
Kab Grobogan	2.02	0.29	0.11	0.47	1.65	1.29	0.04
Kab Blora	1.35	0.78	0.17	0.56	0.98	4.49	0.04
Kab Rembang	0.89	1.13	0.73	0.47	0.80	0.76	3.07
Kab Pati	1.19	0.70	1.28	0.57	0.93	0.40	2.10
Kab Kudus	1.00	0.94	1.38	1.04	1.12	0.02	1.13
Kab Jepara	0.88	0.93	2.85	0.40	1.01	0.80	0.93
Kab Demak	1.55	0.82	0.09	0.50	0.97	0.02	1.66
Kab Semarang	0.65	1.15	1.32	1.78	1.10	0.75	0.18
Kab Temanggung	0.79	1.28	1.68	0.97	0.92	0.69	0.45
Kab Kendal	0.59	0.55	0.95	2.34	0.86	1.30	1.65
Kab Batang	0.72	0.88	1.87	0.57	0.99	2.43	2.05
Kab Pekalongan	0.93	0.76	2.40	0.92	1.05	0.59	0.75
Kab Pemalang	0.96	1.19	1.42	0.68	0.96	0.54	0.96
Kab Tegal	1.16	1.00	0.72	0.97	0.97	0.97	0.57
Kab Brebes	0.55	2.41	0.14	0.34	1.23	1.24	0.94
Kota Magelang	0.23	0.11	0.00	5.27	1.02	0.00	0.16
Kota Surakarta	0.10	0.44	0.02	5.09	1.10	0.00	0.07
Kota Salatiga	0.25	0.67	0.16	4.21	1.48	0.00	0.23
Kota Semarang	0.33	0.52	0.08	4.07	1.10	0.87	0.40
Kota Pekalongan	0.28	0.07	0.00	1.19	0.37	0.00	10.52
Kota Tegal	0.13	0.69	0.00	2.26	0.69	0.00	6.22

Lampiran 2. Nilai Location Quotient Tiap Subsektor Pertanian Berdasarkan Wilayah, 2022

Wilayah	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Jasa Pertanian	Kehutanan	Perikanan
Kab Cilacap	1.11	0.32	2.42	0.78	1.17	1.72	1.45
Kab Banyumas	0.83	0.40	2.20	1.64	0.92	0.72	0.81
Kab Purbalingga	0.58	1.15	1.66	1.24	0.95	0.56	0.81
Kab Banjarnegara	0.57	2.00	0.82	0.42	0.98	0.58	1.02
Kab Kebumen	1.19	1.18	1.24	0.65	0.91	0.64	0.33
Kab Purworejo	1.03	0.94	1.67	0.80	1.12	1.36	0.56
Kab Wonosobo	0.56	2.10	0.39	0.57	0.76	1.69	0.41
Kab Magelang	0.75	1.56	0.58	1.02	0.99	1.19	0.38
Kab Boyolali	0.95	0.64	0.43	1.92	0.97	0.79	0.94
Kab Klaten	1.34	0.45	0.64	1.27	0.83	1.18	1.37
Kab Sukoharjo	1.33	0.23	0.32	2.26	1.12	0.17	0.41
Kab Wonogiri	1.54	0.40	0.97	1.25	0.52	0.96	0.61
Kab Karanganyar	0.95	0.88	0.84	1.77	1.11	0.17	0.15
Kab Sragen	1.48	0.55	0.61	1.08	1.04	0.27	1.35
Kab Grobogan	2.29	0.49	0.10	0.45	1.52	1.32	0.05
Kab Blora	1.57	0.87	0.15	0.56	1.12	4.31	0.04
Kab Rembang	0.93	0.98	0.98	0.45	0.97	0.75	2.97
Kab Pati	1.26	0.69	1.23	0.57	0.92	0.39	2.23
Kab Kudus	1.07	0.92	1.18	1.01	1.01	0.02	1.16
Kab Jepara	0.94	0.94	2.62	0.38	0.92	0.81	1.06
Kab Demak	1.59	0.85	0.06	0.62	0.95	0.01	1.86
Kab Semarang	0.62	1.03	1.47	1.64	1.16	0.74	0.18
Kab Temanggung	0.72	1.22	1.74	1.02	0.91	0.76	0.42
Kab Kendal	0.60	0.53	0.86	2.17	0.66	1.24	1.43
Kab Batang	0.71	0.87	1.80	0.57	1.00	2.56	2.06
Kab Pekalongan	1.01	0.80	2.27	0.81	1.12	0.69	0.63
Kab Pemalang	1.05	1.21	1.29	0.58	0.88	0.59	0.99
Kab Tegal	1.05	1.08	0.71	1.09	1.10	1.05	0.60
Kab Brebes	0.49	2.32	0.16	0.33	1.30	1.16	0.92
Kota Magelang	0.25	0.10	0.00	4.39	0.93	0.00	0.13
Kota Surakarta	0.05	0.33	0.00	4.39	1.00	0.00	0.05
Kota Salatiga	0.19	0.59	0.12	3.67	1.32	0.00	0.19
Kota Semarang	0.27	0.47	0.08	3.58	0.98	0.87	0.35
Kota Pekalongan	0.25	0.06	0.00	1.33	0.40	0.00	8.57
Kota Tegal	0.09	0.48	0.00	1.79	0.58	0.00	6.36

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. Jawa Tengah Dalam Angka 2022. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah 2021. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. NTP 2021. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Blakely, J. and D. H. Bade. 1994. Ilmu Peternakan Cetakan ke-4. Gajah Mada University press, Yogyakarta (Diterjemahkan oleh B. Srigandono).
- Widodo 2006 dalam Siti Rahayu. 2010. Aplikasi tipologi klassen pada strategi pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Boyolali.
- Williamson. 1965. Economic Development and Cultural Change. Chicago.
- Soetriono dan Wibowo, R. 2002. Konsep dan landasan analisis wilayah. Jember: Fakultas pertanian Universitas Jember
- Royat dalam Kuncoro. 2002:28. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Akademi Peremajaan Perusahaan, YKPN,

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

JL. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412804, 8412805, Fax 8311195

Homepage : <https://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id